

LAPORAN HASIL
PENELITIAN HIBAH BERSAING



**POLITIK PEMBANGUNAN PARTAI POLITIK ISLAM:
STUDI PEMIKIRAN POLITIK PEMBANGUNAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

Ketua Peneliti: Drs. Usman Tarigan, MS ✓

Anggota: Dr. Warjio, MA

Drs. Heri Kusmanto, MA

Kegiatan penelitian ini dirancang selama 2 tahun dan merupakan program penelitian desentralisasi DIKTI Tahun Anggaran 2013 dengan biaya dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Nomor :023-04.2.415052/2013 tanggal 5 Desember 2013

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

DESEMBER 2013



HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

1. Judul Penelitian : Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

2. Ketua Peneliti

2.1. Data Pribadi

- a. Nama Lengkap : Drs. Usman Tarigan, MS
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP/Golongan : 131 576 486
- d. Strata/Jab. Fungsional : S2, IV/a
- e. Jabatan structural : Pembina
- f. Fakultas/Jurusan : Pascasarjana UMA/Magister Administrasi Publik (MAP)
- g. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Negara
- h. Alamat Kantor : Jl. Setia Budi No.79. Medan
- i. Telepon : 061 - 8201994
- j. Alamat Rumah : Jl.Kiwi No. 45 Sei Sikambang B. Medan

2.2. Mata kuliah Yang Diampuh dan jumlah SKS

- a. Mata Kuliah I : Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) 3 SKS
- b. Mata Kuliah II : Metode Penelitian 3 SKS
- c. Mata Kuliah III : Kebijakan dan Administrasi Publik 3 SKS
- d. Mata Kuliah IV : Kapita Selekta 3 SKS

2.3. Penelitian Terakhir

- a. Penelitian I : Implementasi Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Untuk Pengelolaan Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Belawan
- b. Penelitian II : Pengaruh Tingkat pendidikan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Medan Johor
- c. Penelitian III : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Penghijauan di Kabupaten Karo

- 1. Lokasi Penelitian : Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta
- 2. Jangka Waktu Penelitian : 2 Tahun
- 3. Pembiayaan : Biaya diajukan ke DIKTI
Biaya Tahun ke 1: Rp. 49.400.000,
Biaya Tahun ke 2: Rp. 50.000.000,

Medan, Desember 2013

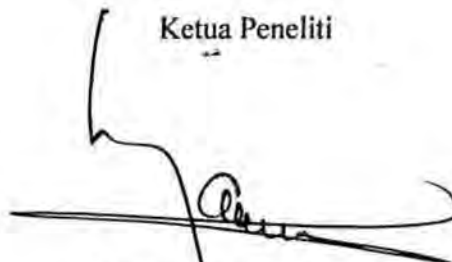
Mengetahui

Direktur Pascasarjana
Universitas Medan Area
(UMA)



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS
NIP. 19600405 1993 03 2001

Ketua Peneliti



Drs. Usman Tarigan, MS
NIP. 1952110813157648

Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Medan Area (UMA)




Dr. Ir. Suswati, MP

Sistematika Penelitian

A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Drs. Usman Tarigan, MS
b. Bidang Keahlian : Pembangunan/MSDM
c. Jabatan Struktural : Wakil Direktur bidang Keuangan Pascasarjana UMA
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Unit kerja : Pascasarjana UMA
f. Alamat Surat : Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA), Jl. Setia Budi No.79 Medan
g. Telepon : 8201994

2. Anggota Peneliti

No	Nama dan Gelar	Keahlian	Mata Kuliah Yang Diasuh	Institusi	Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Warjio, MA	Politik	Politik Pembangunan/Ekonomi Politik	UMA/USU	15
2	Drs. Heri Kusmanto, MA	Politik	Politik Pembangunan/Ekonomi Politik	UMA/USU	15

3. Objek Penelitian

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) fokus pada Pemikiran Politik Pembangunannya

4. Masa pelaksanaan Penelitian

Mulai : 2012

Berakhir : 2014

5. Anggaran Yang diusulkan

Tahun pertama : Rp. 69.400.000

Tahun kedua : Rp. 70.000.000

6. Lokasi Penelitian

Kantor Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

7. Hasil Yang Ditargetkan

- a. Mendapatkan bentuk pemikiran politik pembangunan partai politik Islam, PKS
- b. Mendapatkan kesimpulan, apakah pemikiran politik pembangunan PKS itu sesuai dengan bentuk pemikiran politik pembangunan Islam sehingga didapatkan model Pemikiran politik Pembangunan Partai Islam yang sesuai dengan Politik Pembangunan Islam.

8. Institusi yang Terlibat:

- a. Pusat Studi Pembangunan Politik Islam
- b. Universitas Sumatera Utara (USU)

9. Keterangan lain yang dianggap perlu

Tidak ada.



RINGKASAN

Pengumpulan data penelitian ini telah dilaksanakan. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisa pemikiran politik pembangunan partai Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Metode yang dilakukan adalah kajian secara studi kasus melalui analisis kandungan dokumen yang dimiliki oleh PKS yaitu *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera: Untuk Indonesia Yang Adil, Sejahtera Dan Bermartabat* (2007), *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS* (2008) serta melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan PKS di Jakarta. Dengan pengungkapan melalui penelitian ilmiah ini, dokumen mengenai politik pembangunan yang dimiliki oleh PKS bukan hanya sebagai dokumen politik tetapi harus dipertanggungjawabkan apakah sesuai dengan kaedah politik pembangunan Islam. Hal ini penting karena PKS adalah partai Islam yang juga menyebut dirinya partai dakwah, sehingga konstituennya tidak merasa dirugikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS memiliki pemikiran politik pembangunan.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam konteks modern, demokrasi memberikan ruang yang cukup besar kepada partai politik untuk terlibat aktif dalam pembangunan (Diamond, 1999, Kedouri, 1994, Gellner, 1994, Kreuzer & Vettai, 2004, Lawson, 2005). Partai politik pasti berkeinginan memberdayakan masyarakat dan mendorongnya untuk bisa menikmati hasil pembangunan karena partai politik dibentuk sesungguhnya untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Randall & Svanson, 2002, Green, 2002). Di Indonesia, keinginan memberdayakan masyarakat itu, dan sebagainya sudah dilakukan oleh partai politik dengan beragam program. Oleh sebab itu, partai politik memiliki pandangan politik pembangunannya sendiri (Dirk Tomsa, 2008). Namun, dari segi kelembagaan pandangan politik pembangunan dari partai-partai politik jarang sekali memiliki Platform Pembangunan sebagai politik pembangunan yang ditulis secara serius (Yang & Li, 2009, Enyedi, 2008).

Dalam pandangan peneliti, untuk kasus Indonesia, partai politik yang ada baik sejak zaman Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi memiliki pandangan mengenai Politik Pembangunan. Diantara partai politik itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam satu konferensi khusus yang diadakan International Conference of Asian Political Parties (ICAPP), di Naning, China, 6 September 2011, Ketua Bidang urusan Luar Negeri PKS dalam konferensi itu menjelaskan PKS sebagai partai politik turut serta dalam pemerintahan di Indonesia untuk mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap hasil pembangunan (Kompas, 7 September 2011).

PKS adalah sebuah fenomena yang mencengangkan (Kamaruddin, 2004). Partai ini tidak memiliki akar historis seperti Partai Bulan Bintang (PBB) yang sering disebut-sebut memiliki hubungan dengan Masyumi. Juga tidak memiliki kaitan dengan Ormas Islam seperti seperti hubungan yang terjalin antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nahdlatul Ulama (NU) (MPP PKS, 2007:5).

Menjelang Pemilu 2009 PKS telah mengeluarkan satu buku yang berjudul *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera: Untuk Indonesia Yang Adil*,

Sejahtera Dan Bermartabat (2006). Buku yang berisi mengenai pandangan dan strategi pembangunan ini memiliki 383 halaman. Satu tahun kemudian (2008), PKS juga mengeluarkan satu buku dengan tajuk *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS*. Buku ini merupakan revisi dari buku sebelumnya. Sebagai buku revisi, isinya pun lebih banyak dan mengandung 643 halaman. Kehadiran kedua buku politik pembangunan itu semakin menegaskan PKS sebagai partai modern, inovatif, menarik dan produktif (Warjio, 2011)

Bagi PKS, kedua buku tersebut merupakan uraian mengenai Falsafah Dasar Perjuangan. Buku tersebut juga adalah dokument yang merefleksikan visi, misi dan strategi, program dan sikap PKS ke atas berbagai persoalan bangsa Indonesia, dalam upaya memperjuangkan masyarakat Madani. Dengan demikian, buku ini menjadi penggerak dan motivasi utama kegiatan PKS dan akan menjadikan modal dakwah PKS di semua bidang kehidupan sehingga dapat bermanfaat bagi PKS, pendokong dan masyarakat luas. Buku PKS ini bagi saya menjadi oase, di tengah "kegersangan gurun" pemikiran pembangunan Indonesia yang banyak di dominasi pemikiran Barat

Sebagaimana disebutkan Ketua Majelis Syura PKS, KH. Hilmi Aminuddin (2008), buku Platform Pembangunan PKS merupakan implikasi nilai-nilai yang membuat PKS meraih kemenangan, sebuah konsep, sebuah sistem, pasukan kemenangan dan tujuan (MPP PKS, 2008). Sedangkan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, H. Suharna Supranata menjelaskan bahwa buku Platform Pembangunan PKS merupakan pemikiran mendasar (*al fikru al-asasi*) berupa kumpulan konsep bersistem yang menjadi asas pandangan yang memberikan arah dan tujuan untuk kelestarian kehidupan yang meliputi akidah dan penyelesaian persoalan manusia (MPP PKS, 2008).

Buku Platform Pembangunan tersebut ingin menegaskan kembali karakteristik PKS sebagai Partai Politik Dakwah yang bukan bekerja lima tahun sekali dan hanya untuk meraih kekuasaan (*Struggle for power*) secara struktural. Ia juga sebagai sebuah partai yang melakukan kerja-kerja secara berterusan dalam pembangunan umat dan peradaban. Dengan demikian, buku Platform Pembangunan PKS adalah merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh PKS kepada orang ramai sebagai

bagian dari sosialisasi idea PKS. PKS ingin mendapatkan *image* politik yang baik dari masyarakat. Sebab imej politik yang baik akan memberikan kesan yang positif masyarakat (pemilih) sehingga masyarakat dapat memberikan suaranya (Firmanzah, 2007:231)

Kehadiran kedua buku ini telah mendapat respon yang cukup positif dari berbagai tingkatan masyarakat. Menurut pakar hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqi, SH kedua buku yang dikeluarkan oleh PKS itu sangat komprehensif. Ia juga baru pertama di Indonesia. Ia dapat menjadi contoh baik bagi praktik perpolitikan kebangsaan (MPP PKS, 2007).

Menteri Keuangan Indonesia masa itu, Dr. Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa sangat mengagumi sistem penulisan buku itu. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai seorang Menteri, buku tersebut menjadi bacaan selama kunjungan beliau di Amerika Serikat. Beliau juga memberi nilai 100 untuk buku tersebut (MPP PKS, 2007).

Berdasarkan kenyataan itu, kehadiran buku Platform Pembangunan PKS itu sangat strategis. Pertama, sebagai instrumen komunikasi kepada massa dan pendukung PKS sekaligus sebagai alat untuk merespon dan menyesuaikan perjuangan PKS. Sebab platform itu mencerminkan karakteristik, isi hati dan pemikiran PKS dalam mengurus persoalan pembangunan dan jawaban atas persoalan dan apa yang akan dikerjakan.

Kedua, sasaran yang bersifat internal PKS sebagai Partai Dakwah (M. Anis Matta, 2006, 2007) sebab ia mencerminkan cara pandang Partai Dakwah atas negara, pengurusan negara dan pembangunan. Dengan demikian buku Platform Pembangunan PKS merupakan sekumpulan nilai, harapan dan pencapaian konseptual PKS sebagai Partai Dakwah dalam menjawab persoalan publik.

Itulah kepentingan Platform Pembangunan PKS dalam konteks Partai Dakwah. Dalam Platform Pembangunan tersebut, PKS ingin menegaskan karakter pembangunan yang diyakininya untuk mengatasi tantangan pembangunan kebangsaan selama ini yaitu prinsip integral, universal dan partisipasi total. Prinsip integral bermaksud pembangunan di satu sektor tidak dapat dipisahkan dari sektor lainnya.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk menginventarisasi pemikiran-pemikiran politik pembangunan PKS
2. Untuk menganalisis apakah pemikiran politik pembangunan PKS sesuai dengan konsep politik pembangunan dalam Islam.

3. Urgensi Penelitian

Mengungkap pemikiran politik pembangunan partai politik penting. Partai politik merupakan lembaga politik yang ikut dalam Pemilu dan menjadi sarana penghubung antara kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan (Akbar Tanjung, 2007). Partai politik sebagaimana dinyatakan oleh Utsman Abdul Mui'z Ruslan (2000:109) dapat memainkan peranan penting dalam menciptakan dan mengubah kultur politik. Partai politik menjadi lebih besar dari sekadar alat untuk Pemilu yang mengartikulasikan sikap politik bagi sekelompok manusia, mengingat bahwa ia memainkan peranan besar dalam pendidikan politik. Berdirinya partai politik dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya. Melalui pendekatan sistem, sebagaimana dijelaskan Gabriel Almond & Coleman (1960) keberadaan partai politik dengan sendirinya akan mengubah penampilan semua struktur dalam sistem baik kemampuan dalaman maupun kemampuan antara bangsa.

Pengurusan partai politik yang baik boleh melahirkan ide, gagasan dan mencapai tujuan. Di samping itu, melalui perwakilannya di Parlimen, partai politik dianggap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat (Firmanzah, 2011:57). Oleh karenanya, Politik Pembangunan yang dimiliki oleh partai politik adalah sangat penting untuk mengetahui dan memberikan penilaian kepada partai politik jika mereka berada dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Sebuah partai politik tidak akan mampu mewujudkan cita-citanya jika ia tidak mampu berinteraksi dengan masyarakat. Dengan berinteraksi dengan masyarakat, partai akan mengetahui apa keperluan masyarakat dalam pembangunan (M. Anis Matta, 2007:200). Di sinilah kemudian Politik Pembangunan partai politik bisa disosialisasikan.

Selama ini penelitian mengenai PKS hanya fokus pada persoalan gerakan politik dakwah (Warjio, 2011, Djoni Edward, 2005, Aay Muhammad Furqon, 2004) maupun ideologi (Arif Giyanto & Budi Gunawan, 2008, M.Imdadun Rahmad, 2005, Yon Mahmudi, 2005, Damanik, 2002). Sepengetahuan peneliti, buku Platform Pembangunan PKS belum dikaji atau dinilai dengan satu pendekatan tertentu, apalagi dari segi pendekatan pembangunan berteraskan Islam; apakah sesuai pandangan dari segi Islam atau ia hanya satu Platform Pembangunan yang lazim, apakah ia hanya sekedar penggabungan konsep atau percampuran konsep lazim dan Islam?. Persoalan ini penting diungkapkan mengingat PKS adalah Partai Politik Dakwah (Warjio, 2009, 2010, 2011).

Di samping itu, sangat dikawatirkan jika buku Platform Pembangunan PKS itu tidak nilai secara objektif dengan satu pendekatan tertentu, ia hanya sekedar sebagai dokument politik organisasi yang mau mencari kesempatan dalam menarik dukungan menjelang Pemilu.

Sebagaimana diketahui buku Platform Pembangunan PKS lahir menjelang Pemilu 2009 (Mohammad Nurhashim, 2008). Disebabkan buku tersebut yang muncul dekat Pemilu 2009, ada kesan ia hanya bagian dari Propaganda Politik dan iklan politik PKS. Karena faktor propaganda politik dan iklan politik itu pulalah buku Platform Pembangunan PKS, dikhawatirkan tidak berpijak pada realitas. Benarkah demikian?

Sudah semestinya, sebagai Partai Dakwah, tidak perlu diragukan lagi bahwa politik pembangunan yang dimiliki oleh PKS sebagaimana buku Platform Pembangunan adalah bukan satu dokument politik yang sesuai dalam perspektif Islam.

Apalagi menyimpulkannya hanya sebagai alat propaganda politik atau hanya iklan politik untuk menaikkan image politik PKS. Namun, tanpa menganalisisnya dari perspektif Islam yaitu melalui kaedah pembangunan berteraskan Islam, tentu kita tidak akan pernah mengerti apakah Platform Pembangunan yang dimiliki PKS hanya politik pembangunan yang lazim atau selari dengan perspektif Islam.

II TINJAUAN PUSTAKA

Merujuk pada Moeljarto (1987:xii), politik pembangunan dapat diartikan sebagai cara, arah, untuk mencapai tujuan (dasar) pembangunan. Pandangan lain mengenai politik pembangunan dijelaskan oleh Zulfi Syarif Koto (2011:19). Menurut Zulfi Syarif Koto (2011:19) politik pembangunan merupakan suatu cara atau strategi atau dasar dan model yang dipilih pemerintah dalam melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik berasaskan nilai-nilai yang di anut suatu negara tertentu dan pada waktu tertentu (*time specific*). Pembangunan sebagaimana disebutkan Moeljarto (2007:1), tidak boleh tidak akan bermuatan nilai; artinya, pembangunan ingin mewujudkan tipe masyarakat yang lebih baik.

Sue Downie & Damien Kingsbury (2001) menjelaskan bahwa politik pembangunan yang dikembangkan oleh partai politik melalui nilai-nilai yang dikembangkan partai harus disinergikan dengan keadaan masyarakat. Politik pembangunan yang dikembangkan akan mudah mendapat dukungan masyarakat jika bergerak bersama dengan gerakan sipil society.

Dalam kaitan nilai-nilai pembangunan, Islam telah memberikan pandangannya sendiri. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003: 15) aktivitas pembangunan adalah salah satu cara mengabdikan atau beribadah kepada Allah s.w.t. Oleh yang demikian, pembangunan berteraskan Islam yang dimaksudkan oleh beliau ialah pembangunan yang bergabung antara dua bentuk pembangunan; pembangunan material dengan pembangunan kerohanian dan dilaksanakan menurut garis panduan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Dimaksudkan dengan pembangunan material ialah pembangunan yang boleh menegakkan program-program yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia atau yang dinamakan sebagai *Habl min al-Nas* seperti pengeluaran dan penggunaan (Zeenath Kautsar, 2000).. Manakala pembangunan kerohanian ialah pembangunan yang boleh merapatkan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. seerat mungkin, melaksanakan syariat sebaik mungkin dan berakhlak dengan Allah s.w.t setinggi

mungkin atau yang dinamakan sebagai *Habl min Allah* seperti keimanan, ketakwaan dan sebagainya.

Menurut Muhammad Syukri Salleh (1987, 1990), tujuan pembangunan berteraskan Islam ialah untuk mendapat keredaan Allah s.w.t, atau disebut *mardhatillah* dalam Bahasa Arab. Menurut beliau lagi, sesuatu usaha pembangunan tidak boleh dikatakan berjaya, walaupun mendapat keuntungan yang besar, sekiranya tidak diredai Allah s.w.t. Oleh yang demikian, beliau menetapkan *mardhatillah* sebagai matlamat pembangunan.

Konsep pembangunan menurut perspektif Islam seperti yang digariskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah dan juga yang dikemukakan oleh para ulama dan sarjana dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh pemikiran ekonomi barat. Pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah bersifat material dan spiritual, merangkumi tidak saja pembangunan ekonomi, tetapi juga merangkumi pembangunan manusia itu sendiri, pembangunan sosial, kebudayaan dan sebagainya. Dalam perkataan lain impak kepada pembangunan ekonomi dalam Islam adalah syumul, merata dan bermatlamatkan falah untuk pembinaan Ummah yang bertamadun.

Konsep pembangunan dalam Islam adalah bersifat komprehensif dan bersepadu iaitu pembangunan yang meliputi pembangunan dalam akhlak, kerohanian dan kebendaan. Aspek akhlak, kerohanian, kebendaan, sosial dan ekonomi tidak boleh dipisahkan untuk mencapai matlamat pembangunan sosio-ekonomi dalam Islam. Pembangunan menjadi kegiatan yang berorientasikan matlamat dan nilai yang ditumpukan ke arah mempertingkatkan tahap kesejahteraan hidup manusia dalam semua dimensi. Kesejahteraan dan falah dalam kehidupan manusia melewati kehidupan sementara manusia di dunia dan kesejahteraan, dan falah manusia dalam kehidupan kekal abadi di akhirat.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam ialah pembangunan manusia itu sendiri termasuk lingkungan fisik serta sosial budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenar aktivitas pembangunan termasuk faktor fisik modal, buruh, organisasi, pelajaran dan kebolehan, faktor-faktor kemanusiaan seperti sikap, insentif, rasa dan juga aspirasi

juga menjadi angkubah yang akan meluaskan lagi spektrum pembangunan ekonomi dalam Islam. Sementara konsep pembangunan ekonomi dalam pemikiran ekonomi Barat hanya menekankan pembangunan kebendaan dan lingkungan fisik saja.

Pembangunan dalam Islam bersifat multi-dimensional (berbagai dimensi) yaitu pembangunan yang seimbang di antara faktor kebendaan dan kerohanian, kuantitatif dan kualitatif, dalaman dan luaran. Antara prinsip dinamik dalam kehidupan sosial Islam ialah memberikan penekanan yang istimewa kepada dua perkara; pertama, penggunaan secara optimum sumber-sumber yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. kepada manusia dan juga lingkungan fisikalnya. Kedua, penggunaan serta pengagihan sumber-sumber tadi secara adil dan penggalakkan perhubungan manusia atas dasar hak dan keadilan. Sebagaimana disebutkan oleh Ghazali (1990), asas falsafah pembangunan dalam Islam sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi Islam¹ adalah berasaskan kepada falsafah Tauhid, *rububiyah*, *khilafah* dan *tazkiyah*. Falsafah Tauhid (Keesaan dan kekuasaan Allah) meletakkan peraturan-peraturan tentang hubungan Allah S.W.T. dengan manusia dan hubungan penguasa yang membuat peraturan-peraturan bagi menampung dan menjaga serta mengarahkan kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan. Falsafah ini merupakan undang-undang asasi dalam alam jagat yang merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber supaya berguna, saling dukung mendukung dan saling berkongsi antara mereka.

III METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah Ekplorasi. Menurut Arief Subyantoro & F.X Suwanto (2007:73) penelitian eksplorasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan pengetahuan baik yang belum mahupun yang sudah ada. Manakala metode yang diguna pakai adalah studi kasus (*case study*) iaitu satu kajian dengan menyelidiki secara lebih mendalam dalam segala tingkatan (Yin, 2009, Iskandar, 2009). Sebagaimana dinyatakan Arief Subyantoro & F.X Suwanto (2007:77) tujuan daripada kajian kes adalah mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab akibat, bersifat penerokaan untuk mencari keterangan-keterangan apa penyebab terjadinya masalah dan bagaimana memecahkannya.

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian ini maka digunakan data primer dan data sekunder.

3.1.1 Data Primer

Secara umum, teknik pengumpulan data primer dibagikan kepada wawancara, *focus group discussion* (FGD) dan pemerhatian (Sekaran, 2003:225).

Oleh kerana sampel dapat memberikan gambaran sebenar dari populasi (Pascal Ardilly, 2006, W. Gulo, 2005:78, Arikunto, 1998) maka penelitian ini menggunakan sampel. Penyelidikan ini menggunakan kaedah pensampelan bertujuan (*purposive sampling*). Pemilihan pensampelan bertujuan ini kerana beberapa sebab yaitu pertama, kajian lapangan dijalankan khusus bagi memperoleh informasi yang terkini untuk mendukung data yang telah diperoleh sebelumnya daripada dokumentasi, perpustakaan dan sejarah (Pascal Ardilly, 2006). Alasan penggunaan kaedah pensampelan bertujuan (*purposive sampling*) adalah paling sesuai untuk studi kasus (Iskandar, 2009)

Kedua, teknik ini sesuai digunakan apabila mengalami kesulitan untuk memilih sampel dalam populasi yang khusus. Ketiga, kaedah ini sesuai digunakan bagi mengenal pasti kasus-kasus yang diperlukan bagi mendalami data yang belum



diperoleh daripada data yang telah ada. Hal ini sejalan dengan tujuan kajian ini, yaitu untuk menganalisis pemikiran politik pembangunan PKS.

Dalam kaitan ini digunakan metode bola salju (*snow ball*). Artinya, sampel yang telah ditentukan akan terus membesar sehingga boleh memenuhi jawapan persoalan yang dikaji (Matthew B. Miles & Michael Huberman, 1992). Metode bola salju dianggap tepat kerana dapat mencatat ciri-ciri sosial yang diteliti (W. Gulo, 2005:83). Menurut Lisa Harison (2007:22) metode bola salju boleh diguna pakai untuk mencari atau mendapatkan sampel yang benar-benar diperlukan.

Responden dalam pengumpulan data penelitian ini adalah mereka yang telah melalui proses pemilihan. Proses pemilihan ini berasaskan pengalaman, kepakaran maupun pengetahuan mereka (Koentjaraningrat, 1997:130). Responden yang digunakan dalam memperoleh informasi berasal daripada pengurus PKS di Jakarta maupun yang ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan PKS. Pemilihan mereka ini didasarkan kepada kepakaran dan pemahaman mereka mengenai ideologi, politik pembangunan dan aktiviti PKS.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa teknik pengumpulan data sebagaimana studi kasus yaitu kajian perpustakaan, kajian empirikal, kajian dokumen, kajian sejarah, maupun kajian lapangan (Yin, 2009, Arief Subyantoro & FX. Suwanto, 2007:79).

Dalam kajian perpustakaan, inti pati karya-karya yang berkaitan dikelompokkan mengikut tema-tema tertentu bagi menganalisis persoalan kajian. Melalui kajian perpustakaan ini, inti pati daripada karya-karya yang ada memberikan maklumat penting di dalam menganalisis kajian. Penyelidikan ini menggunakan kajian dokumentasi untuk memperoleh data sekunder selain dari mendapatkan data daripada perpustakaan. Ini sesuai dengan satu pernyataan bahawa suatu penyelidikan yang mengambil perspektif atau orientasi sejarah maka dokumen mempunyai peranan penting (Sartono Kartodirjo, 1997:45).

Dokumen di sini maksudnya ialah setiap bahan tertulis ataupun filem dan rekod. Pengertiannya setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk pengujian suatu peristiwa atau menyajikan perhitungan. Menurut Sartono (1997), dokumen biasanya dibagikan kepada dokumen peribadi dan dokumen rasmi. Dokumen dan rekod digunakan untuk keperluan penyelidikan.

Dalam kaitan ini Sukiman (2009:68) menjelaskan data dokumen digunakan kerana alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong pula (2007:217), kegunaan dokumen dan rekod digunakan kerana merupakan sumber yang kaya, dan mendorong. Kedua, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Ketiga, keduanya berguna dan sesuai dengan penyelidikan kualitatif kerana sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Keempat, hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap yang diselidiki.

Kajian dokumen ini sebagai usaha menyokong fakta sejarah tentang PKS. Sumber dokumen ini diperoleh dari akhbar, majalah, dokumen kerajaan, mahupun dokumen parti (James A. Black & Dean J. Champion, 2001, Sartono Sartodirjo, 1997:54). Sumber dari pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nombor 42 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nombor 22 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nombor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nombor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik digunakan dalam penelitian ini.

Manakala sumber dari parti (PKS) seperti *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera: Untuk Indonesia Yang Adil, Sejahtera Dan Bermartabat* (2007), *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS* (2008) dijadikan rujukan.

Kajian ini juga menggunakan penyelidikan kajian data sejarah atau sirih masa. Kajian data sejarah ini bertujuan untuk mencari perbandingan tentang kaedah mengenai Islam politik di Indonesia masa lepas, sebelum reformasi; masa orde lama, orde Baru dan reformasi. Kajian sejarah digunakan untuk menonjolkan kenyataan bahawa

masyarakat sekarang (termasuk di dalamnya parti politik) ini adalah hasil dari suatu proses sejarah (Sartono Kartodirjo, 1997:45)

3.1.3 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan secara berterusan dengan proses pengumpulan data. Hal ini merujuk pada rekomendasi Matthew & Michael (1992), Akbar Tanjung (2008). Langkah-langkahnya adalah dengan membuat klasifikasi ke atas benda-benda, orang-orang, atau kejadian-kejadian yang menjadi karakternya, sehingga diperoleh rangkaian analisis yang rinci dan sistematis.

Dapatan data yang bersumberkan dokumen, buku mahupun sejarah akan dianalisis menggunakan analisis kandungan (*content analysis*) yang dipaparkan secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis (Sartono Kartodirjo, 1997) atau analisis paparan sederhana. Menurut Iskandar (2009) analisis kandungan (*content analysis*) adalah yang paling sesuai untuk studi kasus..

Adapun langkah-langkah penyelidikan kualitatif sebagaimana dinyatakan oleh Carolina (2002:149) dilakukan dengan lima tahapan Pertama, mengelompokkan kategori-kategori yang belum diiktiraf oleh sarjana. Kedua, membaca, hasil transkrip dan mengenal pasti konsep dan kategori analisis yang muncul dalam temu bual. Ketiga, mengambil butiran-butiran kenyataan responden yang berkenaan dan berkaitan dengan tema persoalan kajian. Keempat, meringkaskan setiap petikan kenyataan responden seperti apa yang dikatakan oleh responden daripada perkara apa maksudnya dan apa percanggahan yang didapati. Kelima, menghubungkan tema-tema perbincangan dengan teoretikal dalam kajian (Sukiman, 2009:76)

Gambar 1. Road Map Penelitian



IV HASIL PENELITIAN

4.1. Pendahuluan

Dari hasil penelitian lapangan dan juga tinjauan pustaka, maka peneliti ini mendapatkan mendapatkan beberapa hal berkaitan dengan tujuan ini. Dalam kaitan ini penelitian ini, maka di dapat beberapa hal yang telah di dapatkan dan dibagi menjadi beberapa bagian; mengenai asal-usul PKS dan Pemikiran politik Pembangunan PKS.

4.2. Asal-usul PKS

Menurut Warjio (2013), jika ditinjau dari sudut pandang pembangunan, PKS sebenarnya produk dari *developmentalisme* sekuler Orde Baru. Aktivistis-aktivis tarbiyah yang belakangan menjadi kader utama PKS umumnya berasal dari kelompok kelas menengah atau keluarga pedesaan yang sejahterah. Dalam banyak hal mereka adalah produk dari keberhasilan ekonomi dan pendidikan Orde Baru: keturunan keluarga kaya yang menikmati keuntungan dari meningkatnya kesempatan bersekolah dan akses terhadap karir profesional. Tetapi mereka juga banyak menolak posisi pemerintah, terutama karena wataknya yang korup, tidak adil, berkompromi dengan kepentingan Barat dan tidak bermoral. Mereka merindukan Indonesia Baru yang lebih egalitarian, demokratis, tegas secara ekonomi dan kultural dan yang paling penting diisi dengan nilai-nilai Islam (Bubalo, Fealy dan Mason, 2012:52)

Kampus, kelompok berpendidikan dan memiliki pengetahuan keislaman yang baik dan kemampuan dalam bidang pengurusan dakwah menjadi satu realiti bahwa sesungguhnya penggerak dakwah dalam proses menuju, mengisi dan mengarahkan transisi demokrasi di adalah kelompok kelas menengah (*middle class*) Islam.

Mereka inilah yang menurut Verdi R Hadiz (2012), memperoleh banyak keuntungan dari narasi bahwa ia didirikan oleh anak-anak muda idealis namun terpelajar, dan tidak terasing dari lembaga-lembaga modren seperti perguruan tinggi. Umum

diketahui bahwa para anggota gerakan tarbiyah (pendidikan) yang sebagian besar di kampus berperan dalam pembentukan sebuah organisasi yang kelak kemudian menjadi PK dan PKS. Mereka inilah yang kemudian paling berperan dalam proses lanjutan gerakan dakwah menjadi partai politik (Warjio, 2011).

Kenyataan ini membuktikan bahwa sebagaimana yang diungkapkan banyak sarjana seperti Harold Crouch (2001), Lev (1993), Tanter & Young (1993), Takashi Shiraishi (2001), Tamario C. Rivera (2001) Hing Ai Yun (2001), Alfred L. Oehlers (2001), Rajah Rasiah (2001), Abdul Rahman Embong (2001), transisi demokrasi selalu digerakkan dan diisi oleh kelompok kelas menengah (*middle class*).

Menurut Presiden PK, Nurmahmudi Ismail, nama *Keadilan* diambil menjadi nama partai karena keadilan adalah jiwa dari ajaran Islam. Tidak ada Islam tanpa keadilan. Keadilan adalah *sunnah kauniyah* yang melingkupi seluruh alam ini. Keadilan yang dijalankan oleh kaum Muslimin kepada sesama Muslim, kepada manusia secara keseluruhan, kepada makhluk yang ada di muka bumi dan kepada alam raya. Dengan jiwa keadilan pula PKS menghadapi kenyataan masyarakat Indonesia yang berbagai dalam budaya, bahasa dan agama (DPP PKS, 2007).

Kenyataan ini menjadi bahan kajian seperti yang dilakukan oleh Aay Muhammad Furkon (2004) yang menyimpulkan bahwa PKS, yang sebelumnya dikenal dengan PK terlahir dari proses politik daripada PK jelas merupakan satu proses sejarah gerakan dakwah kampus (*Sabili* No. 26 Tahun XI, 16 Juli 2004:32-33) yang tidak dapat dinafikan kelahirannya dari masa pergantian politik di Indonesia.

Sebagaimana partai-partai lainnya yang didirikan pada masa pergantian politik di Indonesia, PKS lahir sebagai antitesis dari kerusakan sistem politik di Indonesia (A.M. Fatwah, 2004:12). Hal ini dilakukan dengan berlandaskan kepada cita-cita besar bahwa suatu generasi harus bangkit secara bersama-sama dalam melawan tirani yang ada dalam diri manusia (Fahri Hamzah, 2007).

Sebagaimana ditunjukkan oleh banyak peneliti mengenai pergantian politik (Rabasa & Chalk, 2001, O'Rourke, 2002, Syaiful Mujani, 2007, Sohirin Mohammad Solihin, 2006, Collin, 2008, Wahyudi Kumorotomo, 2008, Akbar Tanjung, 2007, Syamsuddin

diketahui bahwa para anggota gerakan tarbiyah (pendidikan) yang sebagian besar di kampus berperan dalam pembentukan sebuah organisasi yang kelak kemudian menjadi PK dan PKS. Mereka inilah yang kemudian paling berperan dalam proses lanjutan gerakan dakwah menjadi partai politik (Warjio, 2011).

Kenyataan ini membuktikan bahwa sebagaimana yang diungkapkan banyak sarjana seperti Harold Crouch (2001), Lev (1993), Tanter & Young (1993), Takashi Shiraishi (2001), Tamario C. Rivera (2001) Hing Ai Yun (2001), Alfred L. Oehlers (2001), Rajah Rasiah (2001), Abdul Rahman Embong (2001), transisi demokrasi selalu digerakkan dan diisi oleh kelompok kelas menengah (*middle class*).

Menurut Presiden PK, Nurmahmudi Ismail, nama *Keadilan* diambil menjadi nama partai karena keadilan adalah jiwa dari ajaran Islam. Tidak ada Islam tanpa keadilan. Keadilan adalah *sunnah kauniyah* yang melingkupi seluruh alam ini. Keadilan yang dijalankan oleh kaum Muslimin kepada sesama Muslim, kepada manusia secara keseluruhan, kepada makhluk yang ada di muka bumi dan kepada alam raya. Dengan jiwa keadilan pula PKS menghadapi kenyataan masyarakat Indonesia yang berbagai dalam budaya, bahasa dan agama (DPP PKS, 2007).

Kenyataan ini menjadi bahan kajian seperti yang dilakukan oleh Aay Muhammad Furkon (2004) yang menyimpulkan bahwa PKS, yang sebelumnya dikenal dengan PK terlahir dari proses politik daripada PK jelas merupakan satu proses sejarah gerakan dakwah kampus (*Sabili* No. 26 Tahun XI, 16 Julai 2004:32-33) yang tidak dapat dinafikan kelahirannya dari masa pergantian politik di Indonesia.

Sebagaimana partai-partai lainnya yang didirikan pada masa pergantian politik di Indonesia, PKS lahir sebagai antitesis dari kerusakan sistem politik di Indonesia (A.M. Fatwah, 2004:12). Hal ini dilakukan dengan berlandaskan kepada cita-cita besar bahwa suatu generasi harus bangkit secara bersama-sama dalam melawan tirani yang ada dalam diri manusia (Fahri Hamzah, 2007).

Sebagaimana ditunjukkan oleh banyak peneliti mengenai pergantian politik (Rabasa & Chalk, 2001, O'Rourke, 2002, Syaiful Mujani, 2007, Sohirin Mohammad Solihin, 2006, Collin, 2008, Wahyudi Kumorotomo, 2008, Akbar Tanjung, 2007, Syamsuddin

Haris, 2007) yang ditandai masa kejatuhan Soeharto yang lebih dikenali dengan Reformasi dimanfaatkan untuk lebih memikirkan gerakan dakwah kampus yang selama ini kurang selesa.

Pergantian politik atas jatuhnya Presiden Soeharto benar-benar memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk ambil bahagian dalam proses demokrasi yang terbuka dan menjadi klimaks dari apa yang sudah dijelaskan para ilmuwan politik tentang pergantian politik menuju demokrasi.¹ Menurut O'Donnell dan Schmitter (1993), kebebasan adalah tahap mengaktifkan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kumpulan sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah, oleh negara atau pihak ketiga. Bagi individu; jaminan ini termasuk: hak diperiksa di pengadilan, hak privasi dalam rumah, hak berhubungan, hak dibela dalam pengadilan yang adil sesuai dengan hukum yang ada, kebebasan menjalankan gerakan, berbicara dan mengeluarkan pendapat dan lainnya. Bagi berbagai organisasi, jaminan itu mencakup hak-hak seperti bebas putusan hukum akibat ekspresi ketidaksepakatan kolektif atas kebijakan pemerintah, bebas sensor atas berbagai cara komunikasi dan bebas berkumpul secara sukarela dengan warga lain.

Sejalan dengan apa yang diargumentasikan oleh O'Donnell dan Schmitter (1993) kejatuhan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan menimbulkan kebebasan di tingkatan massa dan kegembiraan yang besar bagi rakyat. Tidak terkecuali juga bagi gerakan dakwah. Berbagai gerakan dakwah Islam yang sebelumnya bergerak di bawah tanah kini berani memunculkan aktivitasnya. Memenuhi masa pergantian dan kebebasan tersebut gerakan dakwah harus berpijak pada lima pilar atau prinsip. Pertama, dakwah. Kedua teladan (*qudwa*). Ketiga, kekuatan (*quwwah*). Keempat, pemimpin (*qiyadah*). Kelima, penegakan agama (daulah) (Iman Santoso, 2004).

PKS merupakan salah satu partai politik dakwah yang awalnya dikenal sebagai Partai Keadilan (PK) (Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, 2009). PK didirikan di tengah iklim demokrasi Indonesia yang peluangnya dibuka oleh gerakan reformasi tahun 1998 setelah jatuhnya Presiden Soeharto.

¹ Lihat analisisnya dalam Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead (1992).

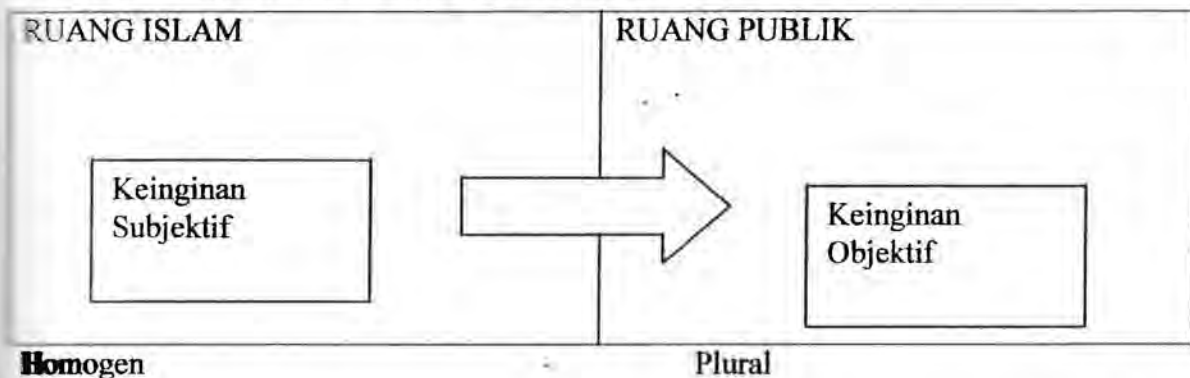
Sebagaimana diketahui, jatuhnya Presiden Soeharto karena puncak ketidakpuasan mahasiswa, Non Government Organization (NGO), pelaksana dan ilmuwan sosial ke atas kekuasaan Soeharto. Soeharto di mata mereka telah menjadi penguasa yang korup, bertindak sewenang-wenang dan berdiri di atas hukum. Berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukannya selama selama tiga dekad, seperti korupsi, dan nepotisme (KKN) menyebabkan biaya efisiensi dalam perekonomian. Perkembangan tuntutan tersebut semakin meluas, karena dibantu oleh ketidakmampuan rezim Soeharto mengatasi krisis ekonomi yang menghancurkan seluruh sektor korporat, seperti perbankan, dan korporat-korporat besar dan menghilangkan penghasilan dari sebahagian warganegara yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara besar-besaran. Persoalan ekonomi tersebut dalam waktu yang relatif singkat memasuki persoalan politik. Soeharto dan kabinetnya berkebijakanakan hasil Pemilu 1997 mengalami krisis kepercayaan.

Krisis kepercayaan ini menjadi lebih parah oleh perilaku elit Soeharto sendiri yang tidak menyadari bahwa Soeharto dan seluruh bangunan kekuasaannya sedang mengalami *distrust* yang parah. Masyarakat tidak percaya lagi, bahwa Soeharto dan kabinetnya mampu mengatasi kerumitan persoalan yang sangat parah. Tetapi anehnya berbagai komponen dalam kabinet Soeharto terus menerus membangun keyakinan warga, bahwa mereka mampu mengatasi persoalan tersebut dengan baik, tanpa harus melakukan liberalisasi politik dan pendemokrasian dalam segala bidang, termasuk memberikan tekanan kepada Soeharto untuk segera turun dari kursi kekuasaannya.

Akibatnya, peningkatan gerakan tersebut terjadi tanggal 20 Mei 1998. Soeharto sendiri dikabarkan menonton gerakan prodemokrasi tersebut dari istana kepresidenan. Melihat betapa hebatnya gerakan tersebut, atas inisiatif sendiri dan disokong surat pernyataan pengunduran diri sejumlah menteri dalam kabinet Soeharto, maka keesokan harinya tanggal 21 Mei 1998 bertempat di Istana negara, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Pengumuman pengunduran dirinya ini disertai oleh penyerahan kekuasaan kepada Wakil Presiden, B.J Habibie dan pelantikan Habbibie oleh Ketua Mahkamah Agung. Pelantikan ini dilakukan di depan Presiden Soeharto dan dihadiri oleh kalangan terbatas yang masih setia dengan Presiden

menjadi partai politik yang merancang dan melaksanakan programnya atas keperluan ruang publik. Inilah yang dalam pendekatan kebijakan publik disebut dengan Public Policy Process (Hill, 2005; Mahony, Newman and Barnett, 2010; Gay, 2005). PKS mempercayai bahwa ruang publik “ dapat diislamisasi” dengan melalui proses-proses yang dijalankan dan program yang telah dibuat. Melalui program-program yang dimiliki oleh PKS inilah proses mengislamisasi ruang public ini dijalankan.

Gambar 4 Objektivikasi Politik Pembangunan PKS



Sumber:MPP PKS, 2008

Dalam pandangan yang sedemikian, PKS sebagaimana disebutkan Kikue Hamayosu (2011) adalah sebuah partai politik Islam yang memiliki organisasi yang baik dalam mengimplementasikan program pembangunan khususnya dalam komunitas yang berbasis pada pragmatisme dan keperluan ruang publik itu sendiri. Kikue Hamayosu (2011) menegaskan:

"I argue that PKS's well-disciplined organizational structures and "communitybuilding" strategy to provide social welfare services that fill both material and spiritual needs of pragmatism electorates are the key to explaining the party's ability to build a relatively solid mass support base. My findings suggest that PKS's daily commitment to welfare services for the underprivileged populations not only helps to reinforce its religious image and identity but also to expand informal long-term community ties between the party elites and supporters that help the party run effective electoral campaigns. The findings presented here are primarily drawn from my fieldwork, in-depth interviews, and participatory observations, as well as primary documents gathered at various localities across Indonesia including Banten, Central Java, East Java, Jakarta, South Sulawesi, West Java, and Yogyakarta "

Pernyataan Kikue Hamayosu (2011) menegaskan bahwa kebijakan program pembangunan PKS adalah berbasis komunitas, dengan menekankan pada keperluan ruang publik. Komunitas dan keperluan ruang publik lah yang membentuk program politik pembangunan PKS. Program pembangunan PKS yang berbasis komunitas ini menjadi bagian kerja PKS yang dilaksanakan dalam Pemilu. Hal ini misalnya dapat dianalisis dari kerja-kerja mereka di bidang keumatan. Dalam bidang pelayanan umat, PKS melakukan pembinaan dan menyelaraskan fungsi-fungsi dengan lembaga-lembaga sosial kemanusiaan, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) dan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Bidang kewanitaan membawahi organisasi seperti Salimah dan Pos Wanita Keadilan. Bidang pemerikasaan ekonomi membina dan menguruskan Syarikat Pekerja Keadilan (SPK) sejak 1998, Koperasi Syar'iah Indonesia (KOSINDO) yang didirikan pada tahun 1988.

Sejak tahun 2000, KOSINDO membina Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI), *Indonesia Labour Foundation* (ILF). Sedangkan sejak awal tahun 2003 menubuhkan dan membina Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) (M. Imdadun Bahmad, 2008).

Lembaga-lembaga PKS tersebut telah membantu di dalam kerja-kerja kemanusiaan. Aksi kemanusiaan PKS yang tak mungkin dilupakan oleh masyarakat Indonesia adalah aksi kemanusiaan terbesar PKS untuk bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengakibatkan lebih dari 200,000 orang meninggal dunia dan menghancurkan NAD. PKS dan masyarakat bertungkus lumus menjadi yang terdepan dalam mengatasi bencana alam ini. Lebih dari 20,000 sukarelawan diterjunkan, bantuan donasi senilai lebih dari Rp. 50 milyar telah disalurkan. Di samping itu lebih dari 150 titik pos bantuan didirikan dan menyalurkan bantuan sebanyak 3,300 ton kepada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Secara teoretikal, PKS telah menerapkan satu pendekatan perubahan sosial politik sebagaimana dijelaskan oleh Bahtiar Effendi (1998). Menurut Bahtiar Effendi (1998)

dalam menyahuti perubahan sosial politik ada tiga hal dilakukan. Pertama, pembaharuan teologi. Kedua, reformasi politik. Ketiga, transformasi sosial. Dalam Pemilu 2004, PKS tidak lagi berbicara ataupun mengasaskan pada pemahaman soal ideologi Islam secara ketat. Tetapi lebih terbuka. PKS setelah Pemilu 1999 tidak lagi menekankan pada isu syariah Islam sebagaimana partai PBB, PPP dalam memperjuangkan Piagam Jakarta. PKS lebih memilih mengesyorkan Piagam Madinah yang menurut PKS lebih terbuka.

Artinya ada pembaharuan teologi PKS dalam memaknakan sebuah isu ideologi. Demikian pun dalam soal reformasi politik, PKS lebih mengesyorkan persoalan perlunya pemerintah yang bersih dan berwibawa bebas, daripada korupsi yang memang diperlukan dalam membangun Indonesia selepas Pemilu 1999. Dalam soal transformasi sosial PKS bersama pertubuhan-pertubuhan yang di bawahnya giat dan aktif membantu masyarakat yang kesusahan terlebih mereka yang terkena bencana. Dalam kaitan ini, PKS tidak hanya terfokus pada soal negara tetapi juga masyarakat

Dalam satu analisisnya mengenai fenomenanya PKS di Pemilu 2004, Dhurorudin Mashad (2008) menjelaskan keberhasilan PKS. Pertama, PKS merespon persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat dan cerdik berpolitik dengan mengangkat isu-isu dalam politik lokal dan nasional.

Kedua, realitas anggota legislatif PKS (1999-2004) dinilai cukup bersih berbanding dengan anggota legislatif dari partai lain.

Ketiga, kesediaan PKS melakukan kontrak politik dengan masyarakat, sehingga menambah kepercayaan masyarakat ke atas PKS tentang iktikad baik kader PKS dalam berpolitik.

Keempat, PKS konsisten melakukan aktivitas-aktivitas politik dalam menanggapi berbagai isu masyarakat, sehingga aktivitas partas senantiasa tersemat dalam pikiran masyarakat.

Kelima, berbagai aktivitas politik massa yang dilakukan PKS sentiasa tersusun rapi dan santun, tidak menumbuhkan implikasi negatif dalam masyarakat, sehingga telah membangun citra positif bagi partai ini di mata masyarakat.

Keenam, pendukung kuat PKS adalah para pemuda yang penuh semangat dan idealisme. Realitas pergerakan pemuda ini sedikit banyak membangun imej bahwa PKS sejalan dengan partainya anak muda, di mana banyak anak muda adalah para pemilih pemula.

Sebagai partai modern, PKS mengembangkan struktur partai yang sistematis. PKS membangun struktur kepengurusan partai dari Pusat di Jakarta, hingga di desa-desa. Di masing-masing tingkatan terdapat struktur yang dirancang baik secara struktural maupun fungsional. Namun demikian, struktur kepengurusan yang kuat terjadi di kawasan-kawasan perkotaan, Sedangkan di kawasan luar kota masih lemah.

Struktur kepengurusan ini mula-mula dikembangkan dari asas dakwah tarbiah yang telah ada. Hal ini dilakukan melalui LDK, ROHIS, pengajian di kantor-kantor maupun lewat pondok pesantren. Selain itu, pengembangan ke kawasan-kawasan baru juga dilakukan melalui sistem pengkaderan PKS. Ini dilakukan secara berterusan oleh pengurus kawasan lain yang sudah kuat. Pengembangan jaringan kepengurusan PKS didukung oleh budaya pengajian tarbiah dengan sistem jejaring. Ini dilakukan secara bersendirian oleh partai, yaitu sistem pengkaderan resmi yang dilakukan dan didukung oleh para pengurus PKS.

Dengan dua asas pengembangan tersebut, PKS berhasil memiliki perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya, PKS telah berhasil mengembangkan dakwahnya hingga ke provinsi-provinsi yang mayoritas penduduknya non-Muslim, seperti Bali, Sulawesi, Utara, NTT (Nusa Tenggara Timur), Irian Jaya Barat dan Papua. Sedangkan Pimpinan partai di daerah yang berkedudukan di kecamatan telah mencecah 65% dari keseluruhan kecamatan yang berjumlah 1009 DPC (Dewan Pimpinan Cabang). Inilah sebuah proses yang oleh Yon Mahmudi (2006) disebut sebagai mengislamisasi Indonesia.

Prestasi politik yang diraih PKS, serta grafik meningkat dari perkembangan partai kalangan tarbiah ini memunculkan optimisme di kalangan internal serta melahirkan analisis bahwa PKS akan berkembang menjadi partai besar. Modal Sumberdaya manusia keluaran tarbiah dan juga modal sosial-budaya serta jaringan organisasi yang kuat akan menjadi modal politik yang sangat penting bagi PKS untuk menjadi partai politik dominan (Djony Edward, 2006).

Sebagaimana asas massa awal PKS (jaringan tarbiah) yang berkembang pesat di kota-kota melalui kampus, PKS adalah juga partai "orang kota". Para kader PKS pada umumnya adalah mereka yang berpendidikan tinggi, pengusaha, dan berbudaya Islam modernis (Fahri Hamzah, 2004). Oleh itu, pemilih PKS memiliki kesamaan dengan organisasi Muhammadiyah dari sisi budaya keagamaan dan sama dengan budaya pendukung PAN (Partai Amanat Kebangsaan) sehingga tidak menghairankan jika anggota Muhammadiyah dan pendukung PAN adalah kelompok yang sangat berpotensi direbut oleh PKS (M. Imdadun Rahmad, 2008).

Demikian juga sangat wajar jika perkembangan PKS terjadi secara baik di kawasan-kawasan perkotaan (khususnya kota besar berpenduduk banyak) dan kurang berkembang di kota-kota kecil apalagi di kampung-kampung. Walau bagaimana pun para aktivis PKS meyakini bahwa secara politik hal ini tetap memiliki nilai strategis. Jakarta, sebagai ibu kota negara, telah dimenangi oleh PKS dengan perolehan 23 persen suara.

Ini merupakan prestasi tersendiri bagi PKS karena telah memenangi Pemilu di level provinsi dan nasional. Selain itu, PKS juga menang di beberapa kabupaten dan kota. Di kota Depok, partai ini menang dengan 27,5 persen. Di Banda Aceh menang dengan 27 persen. Disusul kemenangan di Bekasi dengan 21 persen. Kota Bandung menang dengan 20,5 persen. Sedangkan di Halmahera Selatan, PKS meraih 20 persen, di Medan meraih 16,7 persen. Kota Batam meraih 14 persen dan Kota Padang meraih 12 persen.

Menurut Ali Said Damanik (2004) dalam Pemilu 2004 PKS telah memenuhi dua persyaratan sehingga boleh mendapat ramai dukungan. Pertama, syarat cukup (*sufficient*

condition), sebagai partai agama yang memberikan tempat keyakinan asas yang subjektif. Kedua, syarat perlu (*neccessary condition*), yaitu bersih dan moden yang memberikan keyakinan objektif. Ramai pengundi yang datang dari kelas menengah Muslim kota, megenal pasti bahwa PKS dapat dijadikan instrumen politik mereka. Bersih dan moden, nilai-nilai objektif yang diharapkan oleh kelompok masyarakat tersebut ditemukan dalam diri PKS. Sesuatu yang tidak ditemukan di partai lain. Pilihan ini menjadi semakin mengental ketika mengetahui PKS dibina di atas nilai-nilai agama.

Apa yang diraih PKS di dalam Pemilu 2004, tidak terlepas dari kerja-kerja yang dilakukan selama ini baik sebelum dan selepas Pemilu 1999. Ini adalah buah dari kerja-kerja dakwah yang selama ini mereka lakukan. Sedangkan, bila dikaitkan dengan perspektif teori perlembagaan, sebagaimana disinggung oleh Moses Maor (1997), sebelum partai itu bertahan partai tersebut harus wujud. Kemudian menurut Shaun Bowler dan Jeniffer van Heeder, yang mengutip Aldrich (1995), partai politik akan *survive* apabila dapat memberi manfaat kepada para calon partai politik tersebut maupun para pemilihnya dalam Pemilu. PKS telah mempraktikkan teori-teori tersebut dan memetik hasilnya dalam Pemilu 2004.

Ketika masih menjadi jaringan tarbiah, PKS telah membina pelaburan budaya dan pelaburan sosial yang cukup rapi dan berkesan. PKS telah menyusun jaringan kader dalam satuan-satuan kecil (*usrah*) yang saling membina keimanan, ketaqwaan, ilmu keIslaman, akhlaq dan perilaku seharian di kalangan anggotanya. Para kader tersebut juga menciptakan budaya keislaman yang khas di lingkungan masing-masing, baik dalam keluarga, jemaah, maupun di tempat kerja. Dengan budaya seperti ini, PKS dapat mengembangkan dan mempertahankan ideologi, strategi, pemikiran, nilai-nilai yang dianuti, serta menjadi sarana silaturahmi anggota dan pengrekrutan kader baru.

PKS melalui jaringan kader tarbiahnya juga membentuk lembaga-lembaga dakwah yang memberikan sumbangan berarti bagi keberhasilan partai ini. Lembaga-lembaga yang mereka dirikan, antara lain lembaga bimbingan belajar "Nurul Fikri", lembaga dakwah "*Khoiru Ummah*", lembaga pendidikan Islam "*Al-Hikmah*", lembaga pengkajian

“Sidik”, kumpulan kesenian “Nasyid”, majalah “Sabili”, dan berbagai penerbit buku, antara lain : Al-Ishlahy Press, Gema Insani Press, Pustaka Al-Kautsar, Robbani Press, I’tishom, Era Intermedia dan Asy-Syamil. Di berbagai kawasan, PKS juga telah membentuk lembaga–lembaga lain seperti majlis taklim, lembaga pendidikan Islam, hingga pesantren (M. Imdadun Rahmad, 2008).

Sebagai partai politik, PKS selain memiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di peringkat kabupaten serta Dewan Pimpinan Ranting (DPRa), PKS juga mengembangkan lembaga–lembaga pelayanan, dakwah dan pengembangan kader. PKS cukup berhasil mengembangkan pelaburan sosial berbentuk lembaga maupun organisasi-organisasi “masyarakat madani” yang cukup kuat. Inilah asas PKS untuk mendekati diri dengan pemilih. Hal ini dilakukan melalui dua saluran. Pertama, pembinaan teknis fungsional oleh bidang–bidang terkait. Kedua, pembinaan pengurusan oleh Departemen Pembinaan Organisasi di bawah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya manusia.

Untuk menampung kepakaran daripada pendukung maupun pengikut PKS, juga didirikan Dewan Pakar dan Majelis Budaya (lihat Tabel Majelis Budaya). Banyak aktor atau artis dan intelektual bergabung dalam Dewan Pakar dan Majelis Budaya ini (lihat Tabel pimpinan Dewan Pakar PKS).

Tabel 1 Pimpinan Dewan Pakar PKS

No	Nama	Posisi	Kriteria dan Fungsi
1	Abdul Haris	Pengacara	Kriteria 1. Memiliki kompetensi yang diakui luas 2. Siap bekerja dalam kumpulan 3. Bekerja tanpa niat/cita-cita sempit 4. Berintegriti tinggi Fungsi 1. memberikan masukan
2	Eri Sadewo	Aktivis NGO	
3	Hamid Chalid	Dosen	
4	Hisyam Said	Pengusaha	
5	Imam Sugema	Pakar ekonomi	
6	Ipang Wahid	Pakar Media	
7	Kemal A	Pakar Perniagaan	
8	Kemas A	Pengacara	
9	Soeripto	Sekretaris Kementerian	
10	Mubramsya Ramli	Bekas Duta Besar	
11	Sudirman Said	Aktivis NGO	
12	Venny	Pengusaha	

13	Zulkifli Abu Bakar	Pengusaha	kebijakan strategi kepada Presiden partai 2. memberi masukan pada partai
14	Zulkiflimansyah	Dosen	

Sumber: SAKSI, No. 9 Tahun VI, 3 Mac 2004

Daripada Tabel 1 di atas terlihat bahwa banyak para pakar dari berbagai latar belakang ilmu dan organisasi. Mulai dari pengusaha, dosen, penggiat NGO, pakar ekonomi, pakar komunikasi, pengusaha maupun pengacara. Mereka menaruh kepercayaan kepada PKS untuk bersama-sama membangun negara.

Tabel 2 Majlis Budaya

No	Nama	Posisi	Kriteria Dan Fungsi
1	Ali Karim Oey	Budayawan Tionghoa	Kriteria Sama seperti Dewan pakar Fungsi 1. Merumuskan kebijakan Kebudayaan PKS 2. Mengkomunikasikan kebijakan PKS 3. Menumbuhkan budaya baru yang bersifat agama
2	Anneke Putri	Artis	
3	Astri Ivo	Artis	
4	Pepeng	Artis	
5	Helpy Teana Rosa	Sasterawan	
6	Chaerul Umum	Pengarah Filem	
7	Neno Warisman	Artis	
8	Zakaria Songa	Pengarah Filem	

Sumber: SAKSI, No. 9 Tahun VI, 3 Mac 2004

Peranan Dewan Pakar dan Dewan Budaya dalam sebuah partai politik tidak hanya sebagai penyelaras dan memberikan pemikiran. Dewan Pakar dan Dewan Budaya juga berperanan untuk perbaiki citra dan membolehkannya untuk mengumpulkan undi. Menurut bekas Presiden PKS Hidayat Nurwahid, Dewan Pakar bersifat bebas dan kritis, bukan merupakan batu loncatan untuk kepentingan jangka pendek seperti seleksi menuju kursi Menteri. Dewan Pakar dan Dewan Budaya bekerja untuk seluruh kepentingan bangsa. Jadi anggota Dewan Pakar harus berfikir tentang masa depan umat dan bangsa

secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan PKS saja (*SAKSI*, No 9. Tahun VI Mac 2004).

Sebagaimana dicatat oleh M. Imdadun Rahmad (2006), dan Djony Edwar (2007) PKS juga memiliki hubungan dengan organisasi lain seperti Garda Keadilan (GK), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAMMI) dan Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP). Pertubuhan pemuda ini dibina oleh Departemen Kepeloporan Pemuda bersama bagian Kaderisasi, bagian Kepeloporan Pemuda yang membina Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS).

Apa yang dilakukan oleh PKS dengan mendirikan berbagai organisasi dan bergiat aktif dalam masyarakat adalah bentuk dari penerapan penahapan strategi dakwah yaitu sosialisasi gerakan (*Mihwar sya'bi*). Dalam penahapan ini PKS sebagai gerakan dakwah dalam bentuk partai politik menunjukkan identitas dan keberadaannya dalam masyarakat. Secara teori¹¹, PKS mempercayai bahwa sosialisasi gerakan akan mudah dilakukan setelah tahapan ideologisasi telah kuat dan masyarakat mendukungnya. Masuk ke wilayah sosialisasi gerakan, berarti PKS telah keluar dari eksklusivisme dan membaaur dengan masyarakat dengan program dan kebijakan pembangunan yang dibuat.

Terkait dengan hasil Pemilu 2004, capaian itu memberikan kesempatan kepada kader-kader PKS dalam Parlimen. Mereka adalah kekuatan dan pilar penting kekuatan dakwah untuk merasmikan nilai-nilai Islam yang diperkembangkan dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat yang dikerjakan secara ikhlas dan mujahadah (Mahfudz Siddik, 2004, Al Muzammil Yusuf, 2004). PKS memandang bahwa Parlimen adalah sebagai mimbar dakwah. Artinya, PKS akan berupaya melakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh dan persuasive serta berterusan melalui Parlimen. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengajuan perbahan undang-undang dan peraturan yang ada agar lebih berpihak pada kebaikan umat dan bangsa (Tifatul Sembiring, 2004). Dalam konteks ini politik pembangunan PKS disusun berkebijakan platform pembangunan yang diyakininya.

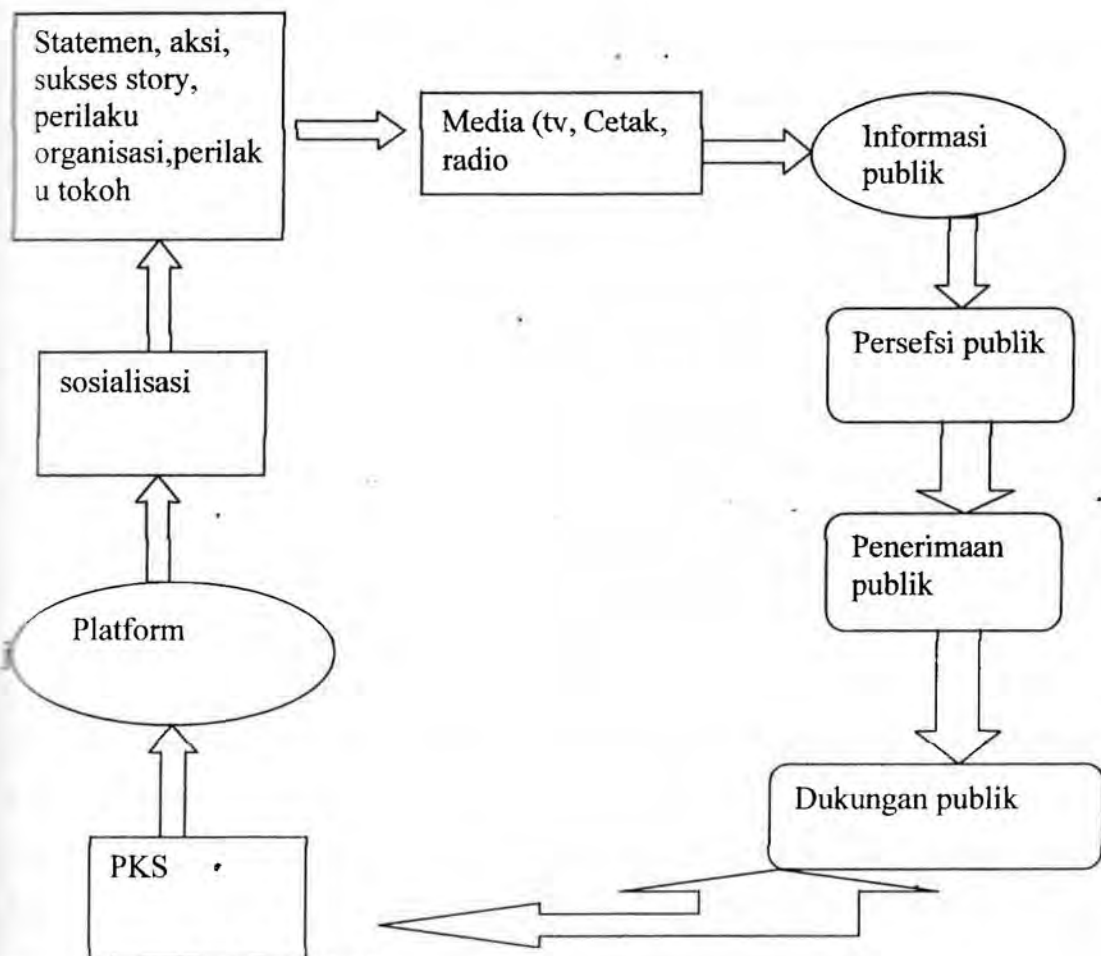
¹¹ Lihat pemahaman tahapan dakwah dalam politik dalam Cahyadi Takariawan (2009).

Bagi PKS, platform politik pembangunan adalah proposal pengelolaan negara yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih dalam rangka menarik perhatian mendulang suara secara objektif dan bertanggungjawab. Atas kebijakan ini platform pembangunan bagi PKS merupakan sikap sekaligus janji politik kepada publik yang bila tidak dipenuhi atau tidak konsisten dijalankan akan mendapat ganjaran negatif yakni tidak dipilih kembali atau tidak dipercaya lagi (Lihat gambar Siklus Platform Pembangunan PKS).

Platform politik pembangunan oleh PKS juga dimaknai sebagai derivasi sekaligus wahana dari ideologi partai. Ini merupakan subjektivitas pandangan terhadap lingkungan sekelilingnya. Platform pembangunan bagi PKS adalah merupakan kristalisasi pemahaman akan arah bagaimana negara dan pengelolaan negara ke depan seharusnya akan dilakukan dalam bingkai dakwah (MPP PKS, 2008:23).

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa menurut PKS, platform tidak lain adalah sekumpulan nilai, harapan dan capaian konseptual dari hasil interaksi dan internalisasi institusi dakwah terhadap sejarah panjang pengalaman dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dengan itu menumbuhkan pemahaman konseptual dalam tubuh institusi dakwah itu sendiri. Dengan platform, setiap kader dakwah memahami gerak langkah sikap dan arah institusi dakwah yang bergulir menembus waktu di dalam ruang publik secara objektif. PKS percaya bahwa penerimaan dan dukungan public terhadap politik pembangunan PKS akan memudahkan PKS untuk mengimplementasikan program-program politik pembangunannya. Oleh karenanya, PKS secara terbuka untuk menerima segala masukan dari politik pembangunannya dari public. Ini merupakan bentuk sirkulasi yang wajar antara partai politik dan public.

Gambar 5 Siklus Platform Pembangunan PKS



Sumber: (MPP PKS, 2008:22)

Kalau kemudian PKS mendapat dukungan dari publi terhadap politik pembangunan yang dijalankannya, lalu seperti apa sebenarnya politik pembangunan PKS? Membaca karya-karya pemimpin PKS seperti Abu Ridha, Irwan Prayitno, M. Anis Matta, Rahmat Abdullah, Zulkiefliemansyah, Hidayat Nur Wahid, saya seolah menemukan kembali pemikiran mereka dalam politik pembangunan PKS. Tanpa mengurangi peran pemimpin PKS lainnya, saya kira merekalah yang menjadi perumus atau *think tank* dari politik pembangunan PKS. Yang jadi persoalan justeru, politik pembangunan yang dikembangkan PKS cenderung moderat, nasionalistik, plural dan sangat minim sekali ketegasannya dalam mengukuhkan ide-ide Islam. Pemikiran-Pemikiran ini kemudian tereduksi dalam Buku Platform Pembangunan. PKS: Memperjuangkan Masyarakat Madani (MPP PKS, 2007). Ide utama Platform Pembangunan PKS adalah:

“Platform (Pembangunan) adalah hasil terus tumbuhnya hajm fikri kita, dan buah dari upaya menghidupkan potensi pemikiran kita (ihya thoqoh fikriyah). Melalui iqro dan interaksi dengan al qur’an dan Sunnah; dengan ayat-ayat kauniyah; maupun mengamati pergulatan peradaban yang terus menerus antara kebudayaan berbasis kebenaran dan kebudayaan berbasis kebatilan; dari hasil pengamatan fenomena sosial kemasyarakatan kemanusiaan yang terhampar dari hasil bacaan buku-buku pemikiran utama yang saleh, maka tumbuh dan berkembangnya hajm fikri kita. Karenanya, jika kita mampu membangun dan memperbarui potensi pemikiran dan idealita kita ini, agar bukan hanya kokoh, tetapi juga berkembang maka kita akan sanggup menghadapi tantangan, memberikan solusi dan harapan. Bukan hanya harapan kepada jamaah dan umat Islam tetapi juga kepada bangsa dan negara dan kemanusiaan. Maka Islam yang rahmatan lilalamin akan muncul menjadi payung yang menangi kemanusiaan.”

Platform Kebijakan Pembangunan PKS merupakan dokument yang merefleksikan visi, misi dan program dan sikap PKS terhadap berbagai persoalan di Indonesia. Platform menjadi motivasi PKS dan penggerak utama kegiatan PKS serta menjadi asset dakwah PKS di semua sektor kehidupan, dapat diberdayakan dan didaya gunakan, bekerja secara integrasi, kontinyu dan fokus dan terarah. Tujuannya adalah sumber daya internal PKS yang terbatas dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan bisa diharapkan oleh para simpatisan, konstituen dan masyarakat luas (MPP PKS, 2008).

Atas alasan inilah menurut saya, jika dianalisis lebih jauh dapatlah disimpulkan bahwa PKS dalam politik pembangunannya mencoba untuk menyesuaikan kondisi sosiologi politik masyarakat Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dalam konteks ini ideologi pembangunan disusun (Annie MM. Hoogvelt, 1989). Atas alasan inilah ideologi dari politik pembangunan PKS coba dikembangkan dalam Platform Pembangunan PKS.

Perlu dicatat bahwa buku Platform Pembangunan PKS muncul menjelang Pemilu 2009. Kenyataan ini dapatlah memberi simpulan bahwa buku politik pembangunan PKS itu disusun untuk kepentingan menarik pendukung sebanyak-banyaknya dan dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan pemahaman ini,--meminjam istilah Burhanuddin (2012), PKS menggunakan Strategi Elektoral untuk meraih banyak dukungan. untuk Pemilu 2009.

Di satu sisi, dua kubu yang ada dalam internal PKS yaitu, Keadilan (yang beraliran ideologis) dan Sejahtera (yang beraliran pragmatis) terlibat kepentingan tarik menarik dalam penyusunan buku itu. Kubu Keadilan yang dimotori oleh Abu Ridha mencoba bertahan untuk tetap PKS menguatkan identitasnya sebagai partai dakwah dan tidak terlalu pragmatis dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

Sedangkan kubu Sejahtera yang dimotori oleh M. Anis Matta, Fahri Hamzah bersikukuh untuk meraih dukungan lebih banyak masyarakat dalam Pemilu 2009, PKS harus terbuka dan pragmatis dan mengutamakan isu universalitas ketimbang isu-isu berkaitan dengan ideologi Islam. Tentu saja ini satu keadaan dan pilihan yang sulit, bersikap terbuka serta pragmatis tetapi di sisi lain harus mengutamakan nilai-nilai Islam. Ketua Dewan Syuro PKS, KH. Hilmi Aminuddin, dalam karyanya: *Menghilangkan Trauma Persepsi* (2008:36) menegaskan, memperhatikan idealitas saja menghasilkan *perfectionist* tetapi tidak bisa dilaksanakan. Memperhatikan rasionalitas saja akan melahirkan teori saja.

Menurut saya dalam merumuskan politik Pembangunannya, aliran kelompok dalam PKS, yaitu Sejahtera, lebih mendominasi dan mempengaruhi dalam mengukuhkan identitas politik pembangunan PKS. Sedangkan aliran Keadilan, kurang begitu

mendominasi bahkan terkesan terpinggir dari mainstream pemikiran politik pembangunan PKS. Hal ini bisa terlihat dalam berbagai hal atau isu yang termaktub dalam politik pembangunan PKS.

Karakter Politik Pembangunan PKS

Setiap pembangunan memiliki karakter. Karakter sangat diperlukan dalam pembangunan. Kedudukan karakter dalam pembangunan bukan saja sebagai identitas tapi juga sebagai penguat dalam pembangunan. Sebagai sebuah entitas politik, PKS juga memiliki karakter dalam politik Pembangunanya. Dari hasil penelitian di dapastkan beberapa hal berkaitan dengan karakter politik pembangunan PKS. Dalam politik pembangunannya, PKS ingin menegaskan karakter pembangunan yang diyakininya untuk mengatasi tantangan pembangunan nasional selama ini. Karakter pembangunan yang diyakini oleh PKS yaitu:

- 1.prinsip integral;
- 2.universal
- 3.partisipasi total.

Pada kesempatan ini, akan dijelaskan masing-masing dari setiap karakter pembangunan PKS. Pertama, prinsip integral. Prinsip integral bermaksud pembangunan disuatu sektor tidak dapat dipisahkan dari sektor lainnya (MPP PKS, 2007, Rama Pratama, 2007a, 2007b, Zulkieflimansyah, 2007a, 2007b, 2007c, Irwan Prayitno, 2007,Tamsil Limrung, 2007).

Dalam pandangan integral, ini bermakna tidak ada ruang pada bidang tertentu saja. Ini bermakna pembangunan dari satu sektor harus memiliki hubungan yang baik dengan sektor lainnya. Universal bermakna, pembangunan tidak akan bermakna dan mencapai hasil yang optimal jika modal yang ada hanya untuk satu generasi saja. Sebab hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu yang otonom yang memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal (Faisal Basri, 2002:112).

Dari sini muncul keragaman dan interaksi sehingga menyuburkan pertukaran (*exchange*), atau transaksi. Transaksi tidak lain merupakan perwujudan dari interaksi antar manusia dengan segala kelebihan dan keragamannya masing-masing. Tujuan akhir dari transaksi ini adalah kesejahteraan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan pandangan universal, yaitu pandangan yang menyangkut lintas generasi, lintas wilayah dan lintas kehidupan. Dengan lintas generasi pembangunan harus tetap dipelihara agar lestari untuk generasi berikutnya.

Kedua, PKS berkeyakinan bahwa keberhasilan pembangunan tergantung pada cara pandang bangsa Indonesia terhadap berbagai aset yang dimiliki, baik aset SDA, sosial, politik maupun budaya. Pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila berbagai modal kebijakan yang ada dipandang hanya untuk satu generasi saja. Krenanya perlu dikembangkan pandangan universal, yaitu pandangan yang mencakupi lintas generasi, lintas sektoral, lintas teritorial dan lintas kehidupan yaitu keberadaan akhirat. Dengan pandangan lintas generasi berarti pembangunan harus dijaga agar tetap dapat berlanjut untuk generasi berikutnya.

Begitu pula dengan pandangan lintas sektoral, maka pembangunan disuatu tempat atau pembangunan wilayah di Indonesia tidak dilakukan semena-mena dengan mengabaikan pengaruhnya terhadap tempat dan wilayah lain. Dengan pandangan lintas kehidupan, maka diyakini para pelaku pembangunan akan menjadikan segala aktivitasnya dalam pembangunan sebagai bagian dari ekspresi religiusitas. Bahkan bangsa Indonesia akan diakui sebagai bangsa yang membawa rahamt bagi seluruh alam karena pandangan yang universal tersebut.

Ketiga, PKS menilai bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya, pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan politik maupun ekonomi akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan demikian PKS memandang partisipasi total

masyarakat, pengusaha dan pemerintah serta kerjasama internasional yang merupakan lintas komponen dan aktor adalah sebuah keharusan dalam mengelola pembangunan dalam pandangan yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

Bagi PKS pembangunan dengan orientasi kualitas hidup manusia adalah lebih utama daripada hanya berfokus pada pembangunan secara fisik (SAKSI, No. 5 Tahun VII 8 Desember 2004). PKS mempercayai pemberdayaan yang demikian akan menyatukan berbagai lapisan masyarakat (MPP PKS, 2007).

Gambar 6 Karakteristik Politik Pembangunan PKS



Sumber: MPP PKS, 2008

Sebagai sebuah partai politik yang hidup, tumbuh dan ambil bagian dalam pemerintahan, politik pembangunan PKS tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan nasional Indonesia (Zulkifliemansyah, 2007). Artinya, dari segi nilai, Pancasila sebagai asas negara menjadikannya bagian dari nilai politik pembangunan PKS. PKS mengakui, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, seperti nilai Ketuhanan yang maha esa, demokrasi, hak asasi manusia, keanekaragaman dan kesatuan.

Sedangkan, Rencana Strategis PKS, Falsafah Kebijakan Perjuangan PKS seperti aqidah, asas dan moralitas Islam menjadi nilai dalam partai yang dijadikan pegangan partai dalam membina politik pembangunan. Nilai inilah yang diyakini oleh PKS untuk mewujudkan keadilan (MPP PKS, 2007: 28).

4.5.2. Visi Pembangunan PKS

Kita telah mengetahui bagaimana karakteristik Politik Pembangunan PKS. Karakteristik ini menjadi entitas politik pembangunan PKS. Sebelum menjelaskan lebih dalam mengenai politik pembangunan PKS, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai visi dan misi PKS. Visi pembangunan dalam konteks ini, menjadi bagian penting dan identitas bagi PKS. Sebuah identitas bagi kebangkitan gerakan politik partai Islam dalam pembangunan di era reformasi¹².

Sekarang marilah kita analisis bagaimana visi pembangunan PKS. Visi pembangunan adalah kondisi objektif pembangunan yang dicita-citakan di masa depan dapat diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam periode tertentu (Sjafrizal, 2009). Bryson (1955) menjelaskan bahwa visi pembangunan didefinisikan sebagai kondisi yang ingin dicapai di masa depan setelah menyampaikan strategi dan kegiatan pembangunan. Visi pembangunan yang baik adalah mengakomodasi masalah pokok yang sangat menkebijakanr bagi masyarakat yang dirumuskan secara konkrit dan jelas serta dapat diwujudkan dalam kenyataan (operasionalnya) dan bukan hal yang muluk-muluk atau sulit untuk mewujudkannya.

¹² Menurut Shukri Hanapi (2011) Istilah kebangkitan semula Islam merujuk kepada kesungguhan umat Islam menegakkan semula Islam dalam kehidupan. Ia bersifat menyeluruh dan merangkumi pelbagai sudut. Misalnya, sudut pengkajian, pemahaman, penghayatan, pelaksanaan dan perkembangan Islam. Ini termasuklah bertambahnya perbincangan dan penulisan tentang Islam, baik dalam bentuk akademik mahupun yang sebaliknya, usaha-usaha melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan termasuk pengamalan, penginstitutionan, perundangan, pentadbiran dan sebagainya serta meningkatnya gerakan atau pertubuhan Islam (Muhammad Syukri Salleh, 1994:106 & 2000c; Chandra Muzaffar, 1988:2; Fadzila Azni Ahmad, 2008:2). Untuk perbincangan terperinci tentang fenomena kebangkitan semula Islam dan hubungannya dengan kelahiran pemikiran teori PBI, lihat Muhammad Syukri Salleh (2002:3-7). Adapun untuk melihat secara lebih mendalam tentang sejarah, fenomena dan perkembangan serta tokoh-tokoh yang mempelopori era kebangkitan Islam di Asia, lihat Zainal Abidin Ahmad (1981) dan Saiful Muzani (1993), manakala di Malaysia pula, lihat Dusuki Ahmad (1980), Chandra Muzaffar (1988) dan Hussin Mutalib (1993).

Dari pemahaman seperti itu dapatlah disimpulkan bahwa Visi pembangunan memberikan panduan mengenai apa yang hendak dicapai pada masa depan. Masa depan yang ingin dicapai adalah masa depan yang dicita-citakan. Namun demikian visi pembangunan adalah sebuah gambaran awal yang harus berpijak pada kenyataan yang diformulasikan dalam satu perancangan pembangunan. Sebuah visi pembangunan tanpa diformulasikan pada satu perancangan yang jelas akan menyebabkan ketidak tercapaian tujuan pembangunan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam buku Platform Pembangunan PKS (MPP PKS, 2007, 2008), PKS telah menetapkan visinya dalam konteks keindonesiaan. Visi Indonesia yang dicita-citakan PKS adalah : “*Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan Bermartabat*”. Bagi PKS, masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada : nilai-nilai, norma, hukum, moral yang didukung oleh keimanan : menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis ; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian *genuine* dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan *ukhuwwah islamiyah* (ikatan keislaman), *ukhuwwan wathaniyyah* (ikatan kebangsaan) dan *ukhuwwah Basyariyyah* (ikatan kemanusiaan), dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pandangan PKS mengenai masyarakat madani seperti ini, diklaim oleh PKS berbeda dengan pandangan tentang masyarakat Madani Umumnya. Konsep Masyarakat Madani, khususnya di Indonesia, sering diartikan sebagai *Civil Society*. Penyaamaan seperti ini sering pula dianggap memberikan satu pemahaman yang berbeda di dalam menganalisis gerakan masyarakat yang muncul dari *bawah*. Padahal jika ditinjau sejarahnya, semestinya pemahaman Masyarakat Madani dan *Civil Society* adalah berbeda (Luthfi J. Kurniawan, dkk, 2008).

Kajian tentang *masyarakat sivil* di Indonesia memperoleh tempat yang sangat luas, namun sebaliknya kajian tentang *masyarakat madani* tidak menjadi arustama, karena anggapan bahwa *masyarakat madani* itu sama ada dengan *masyarakat sivil*. Secara sepintas barangkali prinsip-prinsip dan nilai-nilai antara *masyarakat madani* dan *masyarakat sivil* itu sama (Kutut Suwondo, 2005). Seperti yang diungkap oleh Nurcholish Madjid (1996:51), M. Dawam Rahardjo (1999:146), Azyumardi Azra (2000:5) bahwa amatlah tepat menyebut *masyarakat sivil* sebagai *masyarakat madani* dan dalam perkembangan selanjutnya ternyata *masyarakat madani* banyak diterima oleh cendekiawan Indonesia, terutama cendekiawan muslim sebagai terjemahan *civil society*.

Diskusi mengenai *masyarakat madani* populer di Indonesia setelah dikemukakan oleh Dato Anwar Ibrahim, dalam ceramah di festival Istiqlal tahun 1995 di Jakarta. *Masyarakat madani* menurutnya merupakan masyarakat yang menjadikan agama sebagai sumber (*in put*), peradaban sebagai proses dan kota sebagai hasilnya. Jadi masyarakat madani merupakan pilar utama bagi upaya untuk mewujudkan peradaban, iaitu peradaban yang menjunjung tinggi pluralisme dan semua golongan dalam masyarakat agar dapat hidup secara damai dan sejahtera (Syarifuddin Jurdi, 2000: 535-536).

PKS menyadari, perjuangan untuk mewujudkan Masyarakat Madani, baik secara struktural maupun budaya, sebagai bahagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan objektif bagi umat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bagian dari upaya mewujudkan tujuan ditubuhkannya PKS sebagaimana dicantumkan dalam Perlembagaan PKS. Menurut PKS, Masyarakat Madani sebagai warisan *Sunnah Nabawiyah* adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah.

Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat modern dan menghadirkan fakta historis hukum, moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan negara. Piagam itu juga menghormati keberbagaian dan merealisasikan *Ukhuwwah Islamiyah*, *Ukhuwwah Wathaniyyah* dan *Ukhuwwah Basyariyyah* sekaligus.

Pemahaman masyarakat madani oleh PKS, juga menjadi pijakan intelektual Indonesia, seperti Abdul Aziz (2011). Sebagaimana disampaikan Abdul Aziz (2011), sebagai asas lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah saw telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu biasa disebut “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang antara lain menetapkan : prinsip memanusiaikan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya ; ajakan untuk menyebarluaskan budaya hidup yang aman dan damai ; mengkokohkan sikap solidaritas sosial dan menguatkan semangat silaturahmi ; serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah Swt.

Di Indonesia, aktualisasi nilai-nilai fundamental itu menjadi kebijakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif, bahkan terbukti dalam sejarah Indonesia telah berhasil mengelorakan semangat umat Islam untuk terlibat aktif menghadirkan kebangkitan nasional dengan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan selanjutnya hadir gelombang Reformasi (1998). Bagi PKS, pengaktualisasian nilai-nilai fundamental ini merupakan bentuk implementatif ideologi Islam dan sekaligus mewujudkan cita-cita politiknya dalam pentas kehidupan (Abu Ridha, 2004). Pemahaman ini oleh PKS sebagai bentuk dari upaya menciptakan masyarakat madani di Indonesia.

PKS memahami bahwa Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad pertama Hijriyah. Kedudukan Islam di Indonesia berinteraksi secara dinamis, konstruktif dan positif dengan beragam realitas yang sudah ada di Nusantara, baik ideologi, kultural, sosial budaya, profesi politik dan lainnya. Ini semua dilakukan dengan semangat agama dakwah Islam yang *Rahmatan Lil Alamiin*, jadilah Islam sebagai agama yang menyebar di seluruh Nusantara bahkan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia pun telah mencatat berdirinya beragama pemerintah-pemerintah Islam dan hadirnya budaya dan tradisi ke-Islam-an yang tetap hidup dan bahkan menjadi kontribusi yang cerdas sampai hari ini sekalipun.

Islamisasi secara budaya seperti tersebut di atas juga mempunyai asas historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang, batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para Wali Songo. Ia adalah kewujudan nyata dari *Syumuliyatul Islam* dan risalahnya yang *Rahmatan Lil Alamin*. Karenanya agenda ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an apalagi terorisme.

Sedangkan Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Dalam kaitan ini, PKS menggunakan dakwah dalam politik menciptakan masyarakat madani di Indonesia. Oleh PKS, gerakan tarbiah dimanfaatkan untuk melakukan pendidikan doktrin Islam dan mengarahkan bagaimana mengimplementasikan doktrin tersebut dalam praktik politik. Syafiq Hasyim (2009) menjelaskan gerakan tarbiah sangat dikenal di lingkungan pelajar, profesional muda dan bahagian masyarakat lain yang dapat disebut sebagai "kebangkitan kembali kaum Muslim".

Pimpinan PKS, M. Anis Matta (2002) pula telah menjelaskan bahwa gerakan tarbiah yang terjadi dan banyak diminati di kalangan pemuda Islam dinilai sebagai bentuk rekonstruksi sosial budaya dalam tiga aras. Pertama, rekonstruksi pemikiran dan wawasan keislaman. Kedua, menghasilkan calon kepemimpinan umat melalui gerakan tarbiah dan pengkaderan. Ketiga, menggerakkan massa melalui gerakan sosial yang menyeluruh, khususnya melalui pembentukan kelas menengah baru. Dalam konteks gerakan politik dakwah yang demikian M. Anis Matta (2002) seolah-olah bersikap tolak ansur ke atas negara. Beliau ingin menghindarkan diri dari trauma Islam politik, sebagaimana terjadi pada masa lalu yang selalu berdepan dengan negara.

Oleh karena itu gerakan dakwah harus menggunakan prinsip "partisipasi akan tetapi tidak berpengaruh". Dalam arti bahwa umat Islam diharuskan untuk mengisi atau berperanan di semua bidang yang ada di pemerintah tanpa ada sekatan selagi tidak bertentangan dengan garis perjuangan. Belajar dari kegagalan para aktivis politik Islam generasi awal yang

bercorak formalisme dan legalisme dalam memperjuangkan Islam, M. Anis Matta (2002) membuat pendekatan moderat dalam gerakan dakwah di Indonesia.

Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengalaman Syura, serta Amar Ma'ruf Nahi Munkar, memperjuangkan keadilan, mengkoreksi kezhaliman dan mendakwahkan amal sholeh. Medan politik merupakan bahagian daripada ajaran Islam (Warjio, 2012, Ahmed Vaezi, 2006, Fakhrudin Nursyam, 2008, Hafidz Abdurrahman, 2007, Nurcholish Madjid, 1998, Abu Ridha, 2003, Boutros Balaki, 2009).

Dalam pemahaman PKS, hubungan antara agama dan politik yang tidak dapat dipisahkan dan dapat di wujudkan dalam masyarakat madani. Hal ini dikebijakankan pada pengalaman Rasulullah Muhammad saw. selama sekitar sepuluh tahun di kota Madinah telah tampil sebagai seorang penerima berita suci (sebagai Nabi) dan seorang pemimpin masyarakat politik (sebagai Kepala Negara). Dalam menjalankan peranannya sebagai seorang nabi, beliau adalah seorang tokoh yang tidak boleh dibantahi karena mengamban tugas suci dengan kekuasaan yang suci pula. Sedangkan dalam menjalankan peranan sebagai seorang Kepala Negara, beliau melakukan mesyuarat sesuai dengan perintah Allah. Sebab dalam hal peranan sebagai Kepala Negara atau pemimpin masyarakat itu pada dasarnya beliau melakukan ijtihad. Jika dalam kenyataan hasil ijtihad beliau hampir selamanya merupakan yang terbaik di antara anggota masyarakat beliau, maka hal itu harus diterangkan sebagai akibat logik keunggulan peribadi beliau (Nurcholish Madjid, 1998).

Di sisi lain, politik merupakan bagian yang sangat strategis untuk menata dan menempatkan umat Islam dalam kekuasaan (Ustman Abdul Muiz Ruslan, 2000, Amiur Nuruddin, 2007, Hasrul Azwar, 2007, Syaifullah, 1997, Hamid Enayat, 1982, Yusril Ihza Mahendra, 1999). Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan bimbingan kepada umat agar berpolitik sesuai dengan etika dan moralitas Islam (Abdul Malik Madaniy, 2010). Wilayah politik adalah wilayah yang amat strategik untuk menyebarkan dakwah (Syafiq Hasyim, 2009, Hilmi Aminuddin, 2006, Abu Ridha, 2003).

Bagi PKS, politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum Muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Islam itu sesudah pada tingkat kehidupan individu, keluarga, agar ajaran agama dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui aktifitas kontrol, maupun legislasi dengan membuat undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya (Dewan Syariah Pusat PKS, 2006).

Dalam konteks ini, bagi PKS, maka pilihannya bukan Negara Islam¹³ yang menerapkan Syariah atau Negara Sekuler yang menolak Syariah. Akan tetapi yang PKS inginkan adalah Negara Indonesia yang merealisasikan ajaran agama yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, agar dapat hadirilah Masyarakat Madani yang dicita-citakan itu (MPP PKS, 2007,2008).

Bagi PKS, memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan *ahistorical* bahkan *ahistoric*. Malah tidak sesuai dengan, prinsip kebijakan berdemokrasi konstitusional seperti yang tertera di dalam UUD (Undang-Undang Kebijakan) Negara Republik Indonesia 1945. Pandangan sebegini sememangnya bertentangan dengan pandangan konvensional yang sampaikan sarjana Barat.

¹³ Pembincangan soal Negara Islam menurut Musdah Mulia (2010:20) baru muncul setelah periode *ahistorical*, iatu setelah berakhirnya sistem khilafah di Turki (1924). Sejak masa itu konsep Negara Islam mulai ramai dibincangkan oleh para pemikir politik Islam.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Telah menjelaskan jalinan aktivitas, asal-usul, asas dan kebijakan PKS. Dalam kaitan jalinan aktivitas, PKS merupakan kelanjutan daripada PK. Sedangkan dari segi asal usulnya, PKS berasal dari gerakan dakwah yang digerakkan oleh aktivis muda. Mereka adalah para intelektual yang berupaya membangkitkan kesadaran rakyat akan hak-hak mereka.

Harus pula dicatat bahwa puluhan ribu kader PK adalah para mahasiswa yang secara aktif menumbuhkan semangat perubahan. Mereka bahu-membahu bersama masyarakat meluncurkan roda reformasi untuk mengakhiri rejim Orde Baru. Mereka inilah, para intelektual—yang menurut Clamer (2000) sebagai kelompok yang berhasil menggabungkan semangat tuntutan perubahan sosial dengan semangat ideologi (agama) dalam pembangunan. Bagian ini juga telah mengulas agenda pembangunan PKS. Agenda pembangunan PKS ini merangkumi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.

Pemikiran Politik pembangunan PKS lahir dan dibentuk dengan mendasarkan kepada:

1. Realitas politik PKS sebagai partai berbasis dakwah dengan menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi dan politik Indonesia.

2. Pemikiran politik pembangunan PKS juga disesuaikan dengan arah pembangunan Indonesia (RPJM). Kenyataan ini memberikan kesimpulan bahwa PKS juga tunduk dan patuh terhadap model dan arah pembangunan Indonesia

3. Pemikiran Politik Pembangunan PKS lahir dan dibentuk menjelang Pemilu 2009. Kenyataan ini menjadikan PKS lebih pragmatis dalam mengembangkan pemikiran politik pembangunannya yaitu dengan lebih lentur dan lebih merespon tuntutan untuk meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2009.

5.2. Saran

Penelitian ini telah menemukan beberapa kesimpulan sebagaimana dinyatakan di atas. Beberapa saran diberikan untuk tindak lanjut atau kebijakan yang dapat diambil dari kesimpulan ini.

1. Pemikiran Politik pembangunan PKS masih sekedar dokument politik yang digunakan menjelang Pemilu 2009 dan belum maksimal dalam komunikasi politiknya. Kajian lapangan juga mendapati bahwa para-pendukung PKS termasuk dari elit-elitnya belum secara sungguh-sungguh untuk mendalami dan menjadikan dokument ini sebagai sumber pengambil kebijakan lanjutan dalam soal bagaimana ia dapat diimplementasikan. Oleh karenanya perlu ada sosialisasi lebih lanjut oleh PKS baik kepada kader-kadernya ataupun pendukungnya.

2. Pemikiran politik pembangunan PKS perlu disemaikan dalam bentuk-bentuk komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui dan tidak timbul masalah pandangan negatif terhadap PKS yang dikenal eksklusif.

3. Karena penelitian ini pada tahun I hanya mengetahui bagaimana, pemikiran politik pembangunan PKS maka untuk penelitian berikutnya perlu dilakukan khususnya untuk menilai apakah pemikiran politik pembangunan PKS sudah sesuai dengan kaedah-kaedah politik pembangunan Islam. Ini dapat dilakukan dengan meneruskannya dalam penelitian di tahun ke II.

DAFTAR PUSTAKA

- Aay Muhammad Furqon (2004), *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praktis Politik kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta :Teraju.
- Akhbar Tanjung (2007), *The Golkar Way: Survival Parti Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta : Gramedia.
- Aidit Ghazali (1990), *Development: An Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication
- Ali Said Damanik (2004), "Masa Depan Politik Agama di Indonesia", dalam majalah *Sabili*, No.26 Th.XI 16 Julai 2004.
- Ali Said Damanik (2002), *Fenomena Parti Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta : Teraju.
- Arif Giyanto dan Budi Gunawan (2008), *Bertaruh Citra Dakwah: Membedah Kritis Friksi Muhammdiyah-PKS*, Pajang: Era Intermedia.
- Arif Subiyantoro dan FX Suwanto (2007), *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Jogyakarta: Penerbit Andi.
- David A. de Vaus (2001), *Research Design in Social Science*, London: Sage Publication.
- Sony Edward (2006), *Efek Bola Salju Parti Keadilan Sejahtera*, Jakarta:Harakatuna Publishing.
- Mark Tomsa (2008), *Party Politics in Democratization in Indonesia : Golkar in Post Soeharto Era*, New York: Routledge.

- Diamond (1999), *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore and London :The Jhon Hopkins University Press.
- Donald Green (2002), *Partisan Heart and Mind: Political Parties and Social Identity*, New Haven: Yale University.
- DPP PKS (2004), *Taujiyat Riayah Ma'na wiyah Kader PKS*, Jakarta: Robbani Press.
- DPP PKS (2005), *Profil Kader PKS*, Bandung: Harakatuna.
- DPP PKS (2005), *Manhaj Tarbiyah PKS*, Solo, Media Insani.
- DPP PKS (2006), *Mereka Bicara PKS: Telaah Objektif Perjalanan Dakwah Politik PKS*, Bandung : Fitrah Robbani.
- DPP PKS (2007), *Dari Kader Untuk Bangsa*, Bandung : Fitrah Robbani.
- DPP PKS (2008), *Materi Keterampilan Tekad I*, Solo, Era Intermedia.
- DPP PKS (2008), *Materi Keterampilan Tekad II*, Solo, Era Intermedi
- DPD PKS (2004), *Kurikulum Tarbiyah: Panduan Liqa Ahli Muda PKS*, Solo : Aulia Press.
- DSP PKS (2006), *Fatwah-Fatwah Dewan Syariah PKS*, Bandung : Harakatuna.
- Elie Kedouri (1994), *Democracy and Arab Political Culture*, Portland: Frank Cass.
- Ernest Gellner (1994), *Condition of Liberty: Civil Society and Its Rivalnya*, London: Harish Hamilton.

Firman Noor (2008), "Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi Peranan Partai dan Gejala Pragmatisme", *Jurnal Penelitian Politik*, Vo.6, No.1.

Firmanzah (2011), *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor.

Firmanzah (2007), *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gabriel Almond & James S. Coleman (1960), *The Politics of The Developing Country Areas*, Princeton: NJ. Princeton university Press.

Guang Yang & Miao Li (2009), *Western Political Science Theories and the Development of Political Theories in China*, dalam *Journal of Chinese Political Science/Association of Chinese Political Science*, Juli 2009

Hilmi Aminuddin (2008), *Menghilangkan Trauma Persepsi*, Jakarta: Arah Press.

Iskandar (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada.

James A. Black & Dean J. Champion (2001), *Metod dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Abditama.

Kamaruddin (2004), *Ada Apa Dengan Partai Keadilan Sejahtera : Catatan Warga Universitas Indonesia*, Jakarta:Pustaka Nauka.

Kamaruddin (2004), *Pemenangan Pemilu & Pilkada*, Jakarta: Pustaka Nauka.

Key Lawson (2005), *Linkage and Democracy*, dalam Andrea Rommele, David M.Farell & Piero Ignazi (2005), *Political Parties and Political System: The Concept of Linkages Revisited*, United States of America: Greenwood Publishing.

Lisa Horison (2007), *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana.

Matthew B. Miles & Michael Huberman (1992), *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.

Marcus Kreuzer & Vello Pettai (2004), "Political Parties and The Study of Political Development" dalam Jurnal *World Politics*, Jul 2004

M.Imdadun Rahmad (2005), *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

M.Anis Matta (2007), *Menikmati Demokrasi:Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, Jakarta: Insan Media Publishing House.

M.Anis Matta (2007), *Menuju Cahaya: Recik-Recik Tarbiyah & Dakwah M. Anis Matta*, Jakarta: Fitrah Rabbani.

Mochamad Nurhasim (2008), "Dilemma Sistem Pilihan Raya Umum 2009", Jurnal *Penelitian Politik*, Vol. 6 No.1.

Muhammad Syukri Salleh (1987), *Pembangunan Berteraskan Islam*, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Muhammad Syukri Salleh (1990), *Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam*, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

- Morljarto T (1987), *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- MPP PKS (2006), *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera: Untuk Indonesia Yang Adil dan Sejahtera dan Bermartabat*, Jakarta : MPP PKS
- MPP PKS (2008), *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, Jakarta: MPP PKS.
- Pascal Ardilly (2006), *Sampling Methodes: Exercise and Solution*, USA: Springer.
- Robert K. Yin (2009), *Case Study Research: Desain and Methods*, Los Angeles: Sage Publication.
- Sartono Kartodirjo (1997), *Penelitian Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Gadjamada Universiti Press
- Sukiman (2009), "Kaedah Pembangunan Aceh Pasca Tsunami: Analisis Ke Arah Pembangunan Berteraskan Islam". Tesis Doktor Falsafah, Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia.
- Sue Downie & Kingsbury Damien (2001), "Political development and the re-emergence of civil society in Cambodia", dalam jurnal *Contemporary Southeast Asia*; April 2001
- Usman Abdul Mui'z Ruslan (2000), *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Suatu Analisis Evaluatif Terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan Untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya 1928-1854*, Jakarta: Era Intermedia.

- Vicky Randall & Lars Svarsan (2002), "*Party Institutionalization in New Democracies*", Party Politic ,Vol.8. No.1, Sage Publication, London.
- W. Gulo (2005), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.
- Warjio (2005), "*Perjuangan Ideologi Parti Politik: Kes Parti Islam Masyumi (Indonesia) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) 1945-1969*", tesis master pada Institute Postgraduates Studies Universiti Sains Malaysia.
- Warjio (2010), "*Ideologi Politik PKS*", kertas kerja pada Seminar Antarabangsa Pembangunan Berteraskan Islam, di Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, 13-15 Ogos 2010.
- Warjio (2010), "*Pragmatisme Partai Dakwah dalam Pemilu 2009*", *Jurnal Politeia*, Volume 2, No.2 Julai 2010.
- Warjio (2010), "*Falsafah dan Strategi Politik Dakwah PKS*", *Jurnal Politeia*, Volume 1, No.1 Disember 2010.
- Warjio (2009), "*Tantangan PKS dalam Pemilu 2009*" dalam akhbar *Waspada*, 5 Mei 2009.
- Warjio (2009), "*Analisis Pertubuhan Politik: Pendekatan Lazim dan Islam*" kertas kerja dalam Social Sciences Post Graduates Studies National Seminar, anjuran School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia, September 2009, Hotel Berjaya, Penang, Malaysia.
- Warjio (2009), "*Politik Dakwah Kampus Di Indonesia: Akar Umbi dan Cabaran*" kertas kerja dalam International Graduates Research Writing (INGRAW). anjuran ISDEV-, Social Sciences Universiti Sains Malaysia (USM).

Warjio (2010), "*Politik Jilbab dalam Pilihan Raya Umum 2009*", kertas kerja dalam International Graduates Research Writing (INGRAW), Jun 2010, anjuran ISDEV, , School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia.

Warjio (2010), "*Demo dan Muktamar PKS*", dalam akhbar *Waspada*, 15 Jun 2010.

Warjio (2007), "*Hubungan Parti Politik Islam Masyumi (Indonesia) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS)*" dalam Abdurrahman Haji Ismail, Nazaruddin (2007), *Nasionalisme Indonesia-Malaysia*, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia Press.

Yon Mahmudi (2005), *Parti Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Jakarta:Harakatuna.

Zeenath Kausar (Eds.) (2000), *Political Development: An Islamic Perspective*, Petaling Jaya: International Islamic University Malaysia.

Zulfi Syarif Koto (2011), *Politik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi: Siapa Mendapat Apa*, Jakarta : HUD.

Zsolt Enyedi (2008), *The Social and Attitudinal Basis o Political Parties: Cleavage Politics*, " dalam *Jurnal European Review*, Vol. 16, No. 3, 287–304 r 2008

LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN

TAHUN 1

1.Rincian Alokasi Biaya

1.1. Gaji dan Upah

no	Pelaksanaan kegiatan	Jumlah	Jumlah	Honor/Jam	Biaya (Rp)
1	Ketua Peneliti	1	20 x 40	10.000	8.000.000
2	Anggota Peneliti	2	15 x 40	8.000	9.600.000
	Jumlah biaya				17.600

2.Bahan Habis Pakai

no	Bahan	volume	Biaya satuan	Biaya (Rp)
1	Tape Recorder	1	1.300.000	1.300.000

2	Kaset rekaman	10	10.000	100.000
	Jumlah			1.400.000

Biaya Pengeluaran Lain

No	Nama Bahan	Biaya
1	Administrasi dan Korespondensi (surat menyurat, fax, email, telpon)	500.000
2	Dokumentasi dan Pembuatan Laporan	500.000
3	Fotocopy dan Penjilidan	500.000
4	Biaya Penyusutan alat	1.500.000
5	PPN dan institusi fee Lembaga penelitian dan fakultas	6.000.000
6	Publikasi ke jurnal Akreditasi (internasional)	4.000.000
		13.000.000

Biaya Perjalanan

no	Kota/Tujuan	Volume	Biaya Satuan	Biaya
1	Biaya Perjalanan Penelitian ke Jakarta			
	1. Tiket PP	3 x 2	1.600.000	9.600.000
	2. Akomodasi	3	600.000	1.800.000
2	Biaya mengikuti seminar proposal dan hasil penelitian	2		6.000.000
3	Jumlah biaya			17.400.000

LAMPIRAN II. Sarana yang telah tersedia

1. Komputer/Lap top
2. Scaner
3. printer
4. camera

LAMPIRAN III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

1. Ketua Peneliti

1.1. Data Pribadi

- k. Nama Lengkap : Drs. Usman Tarigan, MS
- l. Jenis Kelamin : Laki-laki
- m. NIP/Golongan : 131 576 486
- n. Strata/Jab. Fungsional : S2, IV/a
- o. Jabatan structural : Lektor Kepala
- p. Fakultas/Jurusan : Pascasarjana UMA/Magister Administrasi Publik (MAP)
- q. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Negara
- r. Alamat Kantor : Jl. Setia Budi No.79. Medan
- s. Telepon : 061 - 8201994
- t. Alamat Rumah : Jl.Kiwi No. 45 Sei Sikambang B. Medan

1.2. Mata kuliah Yang Diampuh dan jumlah SKS

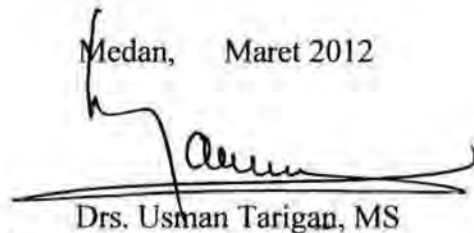
- e. Mata Kuliah I : Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) 3 SKS

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|
| f. Mata Kuliah II | : Metode Penelitian | 3 SKS |
| g. Mata kuliah III | : Kebijakan dan Administrasi Publik | 3 SKS |
| h. Mata Kuliah IV | : Kapita Selekta | 3 SKS |

1.3. Penelitian Terakhir

- | | |
|-------------------|---|
| d. Penelitian I | : Implementasi Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Untuk Pengelolaan Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Belawan |
| e. Penelitian II | : Pengaruh Tingkat pendidikan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Medan Johor |
| f. Penelitian III | : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Penghijauan di Kabupaten Karo |

Medan, Maret 2012



Drs. Usman Tarigan, MS

2. Anggota Peneliti 1

2.1. Data Pribadi

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Nama Lengkap | : Dr. Warjio, MA |
| b. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. NIP/Golongan | : 19740806 200604 1 003 |
| d. Strata/Jab. Fungsional | : S3, III/e |

- e. Jabatan struktural : Lektor
- f. Fakultas/Jurusan : Pascasarjana UMA/Magister Administrasi Publik (MAP)
- g. Bidang Ilmu : Politik
- h. Alamat Kantor : Jl. Setia Budi No.79. Medan
- i. Telepon : 061 - 8201994
- j. Alamat Rumah : Jl.Kompleks Villa Mutiara Johor II Blok J No. 7 Medan

2.2. Mata Kuliah Yang Diampuh dan Jumlah SKS

- a. Mata Kuliah I : Politik Pembangunan 3 SKS
- b. Mata Kuliah II : Politik Lokal 3 SKS
- c. Mata kuliah III : Ekonomi Politik 3 SKS
- d. Mata Kuliah IV : Pemikiran Politik Islam 3 SKS

2.3. Penelitian Terakhir

- a. Penelitian I (2012) : Politik Pembangunan Partai Islam Malaysia (PAS), dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Melalui Research University Team (RUT), Universiti Sains Malaysia (USM), ISDEV, Malaysia (No. Penelitian: 1001/PSOSIAL/856001)
- b. Penelitian II (2011) : Politik Dakwah di Indonesia: Ideologi, Strategi dan Pencapaian PKS
- c. Penelitian III (2011) : Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada di Binjai

2.4. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan

- a. Ketua Program Magister Administrasi Publik (MAP), Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA), 2011-Sekarang
- b. Sekretaris Program Magister Administrasi Publik (MAP), Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA), 2008-2011
- c. Staff Pengajar FISIPOL UMA, 2008-Sekarang

2.5 Seminar /Pelatihan

1. Pemakalah dalam Seminar Internasional ICOC (2011), Australia Western University, Perth, Australia, 2011, dengan Judul Makalah "Pragmatism of Islamic Political Party (PKS)"
2. Pemakalah dalam Seminar Internasional Sustainable Development (2012), Mount State University, New Jersey, Amerika Serikat, dengan Judul Makalah, " Politic of Development Malaysian Islamic Political Party (PAS)"
3. Pemakalah dalam Seminar International Journal of Art and Social Sciences (IJAS) (2012), Italy, dengan Judul Makalah, " The Thinking of Political of Development Malaysian Islamic Political Party (PAS)"
4. Pemakalah dalam Seminar International INGRAW (2010), Universiti Sains Malaysia (USM), Penang dengan Judul Makalah," Politic of Jilbab in Indonesia"
5. Pemakalah dalam Seminar Internasional Social Science in Development (2010), Universiti Sains Malaysia, dengan Judul Makalah" The Ideology of Islamic Political Party (PKS)".

6. Pemakalah dalam International Workshop of Political Development (2012),
Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
7. Pelatihan Buku Ajar (2012), UMA
8. Pelatihan Manajemen Mutu DIKTI (2009)

Medan, 10 Maret 2012



Dr. Warjio, MA

3. Anggota Peneliti II

3.1. Data Pribadi

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 01. Nama | : | Heri Kusmanto. Drs., MA |
| 04. Tempat/Tanggal lahir | : | Probolinggo, 06 Oktober 1964 |

05. Agama/Jenis Kelamin : Islam/Laki-Laki
06. Pangkat/Golongan : IV/a, Lektor Kepala
07. Jabatan : Dosen
08. Alamat Kantor : Jl. Setia Budi No.79. Medan
No. Telp./Fax/E-mail : 061- 8220760
09. Alamat Rumah : Komp. KODAM Sei Mencirim No.1
Sunggal – Deli Serdang
10. Pendidikan yang pernah diikuti :
Strata - 1 : FISIP Universitas Padjajaran, Bandung 1988
Strata - 2 : American Studies, Universitas Indonesia, Jakarta 1995
11. Jabatan Pekerjaan : 1. Dekan Fakultas ISIPOL-UMA 1999 s/d 2003
2. Wakil Rektor-I UMA 2002 s/d sekarang
3. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Tahun 2000 s/d 2011
4. Ketua Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2003 s/d 2010

3. 2. Daftar Karya Ilmiah yang Ditulis dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Tulisan	Tahun	Diterbitkan Sebagai
1.	Bisnis Orang Minangkabau di Medan. Jurnal Internasional Melayu-Polynesia, Kualumpur,	2000	Jurnal

2.	Civil Society dan Pengembangan Demokrasi	2000	Jurnal
3.	Peranan Asosiasi Lokal dalam Otonomi Daerah	2001	Jurnal
4.	Struktur Ekonomi Kabupaten Langkat	2002	Buku
5.	Ikatan Primordial dalam Kegiatan Orang Minangkabau di Sukaramai, Medan, Sumatera Indonesia	2002	Jurnal
6.	In The Shadow of Aceh. The Election in North Sumatera	2001	Jurnal
7.	Desa Tertekan Kekuasaan	2008	Buku

3.3. Daftar Pengabdian pada Masyarakat yang Dilakukan Pada 5 Tahun Terakhir

No.	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Tahun	Lokasi Pengabdian
1.	Program Penyuluhan tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat	2000	Medan
2.	Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun	2001	Simalungun
3.	Evaluasi Pemilu 2004 di Kota Medan	2004	Medan

Medan, Maret 2012

Yang Membuat

Drs. Heri Kusmanto, MA